

**PERAN SEKARMADJI MARIDJAN KARTOSUWIRJO DALAM  
MENDIRIKAN NEGARA ISLAM INDONESIA (1949-1962)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Serjana dalam Program Strata Satu ( S-1)  
Pada Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI)**



<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K A-2013 026 SKI	No. REG : A-2013/SKI/026 ASAL BUKU : TANGGAL ;

Oleh:

**WIWIK SETYANINGSIH**  
NIM: A5. 22. 09. 010

Pembimbing:

**Drs. Nur Rokhim, M. Fil. I.**  
NIP:196003071990031001

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM  
FAKULTAS ADAB  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2013**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

**Yang bertandatangan di bawah ini saya:**

Nama : Wiwik Setyaningsih  
NIM : A52209010  
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI)  
Fakultas : Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata dikemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar sarjana yang saya peroleh.

Surabaya, 09 Juli 2013

Saya yang menyatakan,



Wiwik Setyaningsih

NIM: A52209010

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh **Wiwik Setyaningsih** ( NIM : A52209010 )

ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 09 Juli 2013

**Pembimbing**



**Drs. Nur Rokhim, M. Fil. I.**  
**NIP: 196003071990031001**



## PENGESAHAN TIM PENGUJI

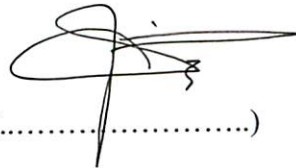
Skripsi ini telah diuji oleh Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada tanggal 30 Juli 2013

Ketua/ Pembimbing : Drs. H. Nur Rokhim, M.Fil.I



(.....)

Penguji I : Dr. H. Achmad Zuhdi DH, M.Fil.I (.....)



Penguji II : Muzaiyana, M.Fil.I



(.....)

Sekretaris : Himmatul Khoiroh, M.Pd



(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel  
Surabaya



**Dr. Kharisudin, M.Ag**  
NIP. 196807171993031007

## ABSTRAK

WIWIK SETYANINGSIH, 2013: Skripsi yang berjudul **“Peran S. M. Kartosuwirjo Dalam Mendirikan Negara Islam Indonesia (1949-1962).”** Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013

S.M. Kartosuwirjo adalah imam yang memimpin gerakan Darul Islam selama bertahun-tahun. Perjuangannya didasari keinginan untuk membentuk Indonesia menjadi Negara Islam, bukan Negara sekuler. Penelitian ini difokuskan pada biografi S. M. kartosuwirjo, konsep negara Islam menurut S. M. Kartosuwirjo, peran S.M. Kartosuwirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia.

Pada skripsi ini menggunakan pendekatan Sosiologi dan menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan rekonstruksi sejarah. Metode sejarah yang pertama adalah Heuristik. Yakni dimulai dari mencari sumber primer ataupun sekunder. Yang kedua setelah sumber ditemukan, kemudian melakukan kritik terhadap sumber yang didapat untuk mendapatkan keabsahan sumber. Yang ketiga interpretasi atau penafsiran terhadap sumber atau data sejarah yang disebut dengan analisis sejarah. Historiografi merupakan tahap terakhir dalam metode sejarah yakni usaha untuk merekonstruksi kejadian masa lampau dengan memaparkan secara sistematis, terperinci, dan komunikatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peranan. Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial dalam hal ini adalah peran Kartosuwirjo.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, pendiri Negara Islam Indonesia adalah Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo yang dilahirkan di Cepu pada tanggal 07 Januari 1905. Kedua, konsep Negara Islam yang didirikan Kartosuwirjo mengikuti konsep Negara Islam pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad. Ketiga, Kertosuwirjo memproklamasikan pada 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya.

Kata kunci: Kartosuwirjo, NII, Darul Islam

## ABSTRAK

SETYANINGSIH, WIWIK . 2013. *The Role of S. M. Kartosuwirjo In Establishing the Islamic State of Indonesia (1949-1962)*. Undergraduate Thesis, Departement of Islamic History and Culture, Faculty of Letters, State Institute for Islamic Studies Sunan Ampel Surabaya. Supervisor: Drs. Nur Rokhim, M. Fil. I.

S. M. Kartosuwirjo was a Leader of Darul Islam movement for many years. His Struggle based on the his desire to turn Indonesia into an Islamic state, not a secular State. This research focuses on biography of S. M. Kartosuwirjo, the concept of an Islamic state according to S. M. Kartosuwirjo, S. M. Kartosuwirjo's role in establishing an Islamic state in Indonesia.

This research uses sociological and biographical approach with historical method. The first method is Heuristic. It is starting from collecting the primary or secondary sources. The second, after the sources are found, the next step is Criticism to get the validity of the sources. The third is interpretation of the sources or historical analyzing. Historiography is the last step in the historical method. It attempts to reconstruct the history of past events by describing systematically, detail, and communicative. The theory used in this research is Role Theory. Role theory is a perspective in sociology and social psychology that considers most of the daily activities roled by the categories defined socially, in this case is Kartosuwirjo's role.

Based on the results of this study can be obtained three conclusions. First, the founder of the Islamic State of Indonesia is Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo who was boen in Cepu born on January 7, 1905. Second, the concept of the Islamic state that was established by Kartisuwirjo followed the concept of the Islamic State by the Prophet Muhammad. Third, Kertosuwirjo proclaimed Islamic State of Indonesia on August 7, 1949 in Tasikmalaya.

Key word: Kartosuwirjo, NII, dan Darul Islam

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6

E. Pendekatan dan Kerangka Teoretik .....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Metode Penelitian .....	9
H. Sistematika Bahasan .....	13

## **BAB II: BIOGRAFI S. M. KARTOSUWIRJO ..... 16**

A. Biografi S. M. Kartosuwirjo .....	16
B. Latar Belakang Pendidikan S. M. Kartosuwirjo .....	19
C. Basis Politik S. M. Kartosuwirjo .....	22

## **BAB III: KONSEP NEGARA ISLAM MENURUT S. M. KARTOSUWIRJO..... 38**

A. Asal Mula Negara Islam dan Perkembangannya .....	38
B. Dasar Negara dan Sistem Pemerintahan .....	44
C. Konstitusi Negara Islam .....	49
1. Konstitusi Negara Madinah .....	49
2. Konstitusi Negara Islam Menurut Al Mawardi.....	56



3. Konstitusi Negara Islam S. M. Kartosuwirjo .....	67
---	----

#### **BAB IV: PERAN S. M. KARTOSUWIRJO DALAM MENDIRIKAN NEGARA ISLAM INDONESIA ..... 70**

A. Perjuangan S. M. Kartosuwirjo dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia .....	70
B. Perjuangan S. M. Kartosuwirjo dalam Mendirikan Negara Islam Indonesia.....	79
C. Akhir Perjuangan S. M. Kartosuwirjo .....	94

#### **BAB V: PENUTUP ..... 103**

A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	106

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

*Darul Islam* (bahasa Arab *dar al Islam*) secara harfiah berarti “rumah” atau “keluarga” Islam, yaitu “dunia atau wilayah Islam.” Adapun yang dimaksud adalah negara atau pemerintahan yang menerapkan hukum Islam sebagai hukum pemerintahan. Warga negara atau orang-orang yang tinggal di wilayah kekuasaannya yang tidak beragama Islam harus tunduk kepada hukum yang berlaku, dan mereka mendapat perlindungan. Pemerintahan yang pertama kali menerapkan hukum Islam menjadi hukum negara adalah pemerintahan Islam jaman Nabi Muhammad SAW.<sup>1</sup> Lawannya adalah *Darul Harb*, “wilayah perang, dunia kaum kafir”, yang berangsur-angsur akan dimasukkan ke dalam *dar al Islam*. Di Indonesia kata-kata *Darul Islam* digunakan untuk menyatakan gerakan-

gerakan sesudah 1945 yang berusaha dengan kekerasan untuk merealisasikan cita-cita *Negara Islam Indonesia*.<sup>2</sup> *Darul Islam* mengartikan gerakannya sebagai satu-satunya gerakan yang menyeru kepada yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*.<sup>3</sup>

Darul Islam (DI) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Negara Islam Indonesia” (NII) dan bisa disebut juga dengan “N sebelas”, adalah kelompok orang-orang yang ingin membentuk sebuah negara yang berdasarkan

---

<sup>1</sup> E. Nugroho, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1988), 236.

<sup>2</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam (Sebuah Pemberontakan)*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), 1.

<sup>3</sup> Al-Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam (Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front)*, (Jakarta: Darul Falah, 1998), 76.

Islam.<sup>4</sup> Berbicara tentang Darul Islam maka tidak akan lepas dari sosok S.M. Kartosuwirjo. Ia adalah imam yang memimpin gerakan Darul Islam selama bertahun-tahun. Perjuangannya didasari keinginan untuk membentuk Indonesia menjadi Negara Islam, bukan Negara sekuler. Oleh karena itu ia banyak bertentangan dengan tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno. Padahal Soekarno dan Kartosuwirjo merupakan murid dari H.O.S Tjokroaminoto yang pernah mondok di rumahnya.

Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo lahir di Cepu, Jawa Tengah pada 07 Februari 1905, dari kalangan keluarga priyayi Jawa. Ayahnya seorang mantri candu, pegawai perantara dalam jaringan distribusi candu siap pakai yang dikontrol dan diusahakan pemerintah Belanda. Nama Kartosuwirjo sejatinya nama sang ayah. Ia sendiri bernama Sekarmadji Maridjan. Nama Sekarmadji mengacu dari nama Samiadji, nama lain dari Puntadewa atau Yudistira, putra tertua Pandawa. Sedangkan nama Maridjan berasal dari *mi rojun* yang berarti "naik terus". Dengan bekerja pada pemerintah Belanda sebagai mantri candu, maka orangtua Kartosuwirjo dapat disebut cukup mampu secara finansial, dan dengan demikian kehidupan Karto kecil cukup mapan. Dengan posisi sosial orang tuanya itu, Kartosuwirjo menjadi salah satu dari segelintir anak bumiputra yang dapat mengenyam pendidikan ala Barat, hasil politik etis pemerintah kolonial Belanda.<sup>5</sup> Ia mempunyai kakak perempuan yang tinggal di Surakarta pada tahun 50-an yang hidup dengan penuh keguyuban, dan seorang kakak laki-laki yang memimpin

---

<sup>4</sup> Afadlal,dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), 226.

<sup>5</sup> Kholid O. Santoso, *Jejak-Jejak Sang Petualang Pemberontak (Pemikiran, Gerakan dan Ekspresi Politik S.M Kartosuwirjo dan Daud Beureueh)*, (Bandung: Segaorsy, 2006), 60.

Serikat Buruh Kereta Api pada tahun 20-an, ketika di Indonesia terbentuk berbagai serikat buruh.<sup>6</sup>

Karir Kartosuwirjo dimulai ketika ia bergabung dengan pemuda Jong Java sejak tahun 1923 di Surabaya, dan tidak lama setelah itu dia menjadi ketua cabang Jong Java di Surabaya. Ketika anggota-anggota Jong Java yang lebih mengutamakan cita-cita keislamannya keluar dari Jong Java dan pada tahun 1925 mereka mendirikan Jong Islamieten Bond (JIB), Kartosuwirjo pindah ke organisasi ini, dan tidak lama kemudian menjadi ketua cabang JIB di Surabaya.<sup>7</sup> Pada tahun 1927 saat kongres PSIHT (*Partai Sjarikat Islam Hindia Timoer*) Kartosuwirjo terpilih menjadi sekretaris umum PSIHT. Dan pada tahun itu pula Kartosuwirjo bekerja sebagai wartawan di koran harian *Fadjar Asia*.<sup>8</sup>

Pada akhir juli 1947 pihak Belanda menyadari bahwa mereka harus menerima himbuan PBB agar diadakan suatu gencatan senjata, yang kemudian dilaksanakan oleh Belanda dan RI pada 4 Agustus 1947. PBB memperkenalkan Sjahrir untuk berbicara atas nama RI, tetapi PBB tidak bersedia menerima wakil-wakil dari daerah Indonesia yang dikuasai Belanda. Selanjutnya pembicaraan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK-PBB) membentuk “Jasa baik” yang beranggotakan wakil-wakil dari Australia, Belanda dan Amerika Serikat, untuk membantu perundingan-perundingan Indonesia-Belanda dan mencapai gencatan senjata yang baru. Hasil dari pembicaraan itu adalah bahwa

---

<sup>6</sup> Al- Chaidar, *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo (Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/DI-TII semasa Orde Lama dan Orde Baru)*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), 19.

<sup>7</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo (Angan-Angan yang Gagal)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 8.

<sup>8</sup> Al- Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 35.

perundingan akan dilaksanakan di suatu tempat yang netral bagi kedua belah pihak, yakni di atas kapal Renville milik Amerika Serikat yang waktu itu sedang berlabuh di dekat Shanghai dan akan sampai di Tanjung Priok pada 2 Desember 1947.<sup>9</sup>

Perundingan RI-Belanda di atas kapal Renville itu kemudian dikenal dengan “Perjanjian Renville”. Perundingan dilaksanakan pada 8 Desember 1947 dan berakhir pada 17 Januari 1948.<sup>10</sup> perjanjian inilah yang menyebabkan Kartosuwirjo mendirikan Negara Islam Indonesia karena menurut Kartosuwirjo perjanjian Renville sangat merugikan umat muslim. Salah satu ketentuan persetujuan Renville adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Pasukan Republik harus meninggalkan hampir seluruh wilayah Jawa Barat, Jawa tengah dari perbatasan dengan Jawa Barat kira-kira sampai Kebumen di selatan dan Semarang di utara, dan daerah Jawa Timur sebelah timur Malang. Itu artinya pasukan-pasukan Republik Indonesia harus meninggalkan daerah tetapi Kartosuwirjo dan dua pasukan gerilya Islam, *Hizbullah* dan *Sabilillah* tetap tinggal, mereka berpendapat, perjuangan melawan Belanda harus dilanjutkan, tidak ada alternatif lain kecuali tetap di Jawa Barat dan memimpin serta mengkoordinasikan perlawanan di sini.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Kholid O. Santoso, *Jejak-Jejak Sang Petualang*, 84-85.

<sup>10</sup> Ibid., 85.

<sup>11</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam*, 10.

Negara Islam! Itulah cita-cita hakiki bagi Sekarmaji Maridjan Kartosuwirjo (SM Kartosuwirjo) bahkan untuk merealisasikan tujuan tersebut ia rela untuk diburu bahkan diberikan hukuman mati oleh pemerintah Soekarno pada saat itu. Kartosuwirjo sedemikian rupa memperjuangkan Negara Islam. Bagi seorang Kartosuwirjo demi terwujudnya masyarakat Islam yang sempurna baik pada tataran ibadah maupun muamalah serta hukum, maka yang dibutuhkan untuk hal itu adalah sebuah Negara Islam. Seperti yang terdapat pada kaidah *Ushul fiqh* yang menyatakan bahwa “sesuatu yang dikarenakan keberadaannya untuk menuju sesuatu yang telah diwajibkan maka keberadaannya menjadi wajib”. Karena itu keberadaan Negara Islam adalah wajib adanya dikarenakan dengan perantara Negara tersebut maka aturan-aturan mengenai syariat akan menjadi lebih sempurna.

Hampir seluruh kaum muslimin di negeri ini, memiliki semangat untuk memperjuangkan agamanya, bahkan seringkali terjadi hinuk pikuk di ruang diskusi maupun seminar untuk hal tersebut. Tetapi begitu tiba-tiba memasuki pembicaraan menyangkut perlunya mendirikan Negara Islam, kita akan menyaksikan segera setelah itu mereka akan menghindar dan bungkam seribu bahasa. Beda halnya dengan S.M. Kartosuwirjo, ia dengan gigih tetap memperjuangkan berdirinya Negara Islam di Indonesia. Dengan melihat semangat perjuangan yang ditanamkan Kartosuwirjo membuat penulis ingin mengambil judul tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Biografi S.M. Kartosuwirjo?
2. Bagaimana konsep Negara Islam menurut S.M. Kartosuwirjo?
3. Bagaimana peran S.M. Kartosuwirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Biografi S.M. Kartosuwirjo.
2. Untuk mengetahui konsep Negara Islam menurut S.M. Kartosuwirjo
3. Untuk mengetahui peran S.M. Kartosuwirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Penelitian tentang peranan Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo dalam

mendirikan Negara Islam Indonesia, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan S1 pada jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya
2. Bagi penulis merupakan wadah untuk mengetahui lebih jauh tentang peranan S.M. Kartosuwirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia

3. Bagi akademis, ikut serta menambah khasanah keilmuan dalam bidang sejarah Islam Indonesia dalam bentuk karya ilmiah khususnya di Fakultas ADAB.
4. Bagi Masyarakat, yakni dapat mengetahui tentang peranan dan perjuangan S.M. Kartosuwirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia, serta dapat memberikan kebanggaan terhadap orang islam bahwa terdapat pejuang islam yang berjuang untuk mendirikan Negara Islam Indonesia.

#### **E. Pendekatan dan Kerangka Teori**

Penulisan ini menggunakan sosiologis dan pendekatan biografi. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menggambarkan interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan, antara individu maupun golongan yang akan menimbulkan suatu dinamika kehidupan. Kedinamikaan dan perubahan sosial akan bermuara pada terjadinya mobilitas sosial. Pendekatan biografi merupakan penelitian biografi yang mempelajari seluk beluk seorang individu berkaitan dengan pengalamannya, sebagaimana diceritakan orang bersangkutan kepada peneliti, serta sumber sumber lain yang relevan, seperti arsip dan dokumen, anggota keluarganya, koleganya, dan lainnya. Biografi digunakan untuk



mendapatkan informasi tentang pengalaman pribadi, proses “menjadi”, dan karakter seorang tokoh.<sup>12</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh Weber, tujuan penggunaan sosiologi adalah untuk memahami arti subjektif dari kelakuan sosial, bukan semata-mata menyelidiki arti objektifnya. Dari sini, tampaklah bahwa fungsionalisasi sosiologi mengarahkan pengkaji sejarah pada pencarian arti yang dituju oleh tindakan individual berkenaan dengan peristiwa-peristiwa kolektif sehingga pengetahuan teoretislah yang akan mampu membimbing sejarawan dalam menemukan motif-motif dari suatu tindakan atau faktor-faktor dari suatu peristiwa.<sup>13</sup> Jadi pendekatan sosiologi digunakan untuk mengetahui tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh Kartosuwirjo, yang diteliti melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peranan, teori

peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya,

---

<sup>12</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 171

<sup>13</sup> Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Arus Media, 2007), 23.

berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.<sup>14</sup> Menurut teori peran dalam kajiannya terhadap hubungan antar manusia ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario atau peran-peran yang telah disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Menurut teori ini, jika seorang mematuhi skenario, maka hidupnya akan harmonis, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh "penonton" dan ditegur oleh "sutradara". Seperti halnya dengan Kartosuwirjo, jika ia mentaati skenarionya sebagai warga negara Indonesia, maka ia tidak akan mendapatkan hukuman dari pemerintah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

S.M. Kartosuwirjo merupakan salah satu tokoh besar yang teguh hati ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam Indonesia, sehingga banyak yang menulis tentang perjuangan beliau. Terdapat penelitian tentang Kartosuwirjo yaitu skripsi: "Negara Islam Dalam Perspektif Fundamentalisme (Studi Komparatif Atas Pemikiran Kartosuwirjo dan Kahar Muzakkar)", yang ditulis oleh Zainuri Said yang merupakan mahasiswa fakultas Syariah pada tahun 2005. Akan tetapi dalam hal ini penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai peran S.M. Kartosuwirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat

---

<sup>14</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Teori\\_peran](http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran) (diakses 21 juni 2013).

empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.<sup>15</sup>

Metode penelitian sejarah lazim juga disebut metode sejarah. Metode itu sendiri berarti jalan atau petunjuk. Lebih khusus lagi sebagaimana dikemukakan oleh Gilbert J Garraghan, metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang efektif, menilainya secara kritis. berdasarkan pengertian diatas, para ahli ilmu sejarah sepakat untuk menetapkan empat kegiatan pokok di dalam cara peneliti sejarah. istilah yang mereka gunakan berbeda-beda tetapi intinya sama. Ringkasnya, setiap langkah ini biasa disebut secara berurutan dengan: *heuristik*, kritik atau *verifikasi*, *aufassung* atau *interpretasi* dan *darstellung* atau *historiografi*.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Heuristik

Heuristik yaitu teknik mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah atau data sejarah. Penelitian ini adalah *library reasearch* (penelitian kepustakaan), secara definitif kajian pustaka, penelitian terdahulu, studi pustaka, tinjauan pustaka menurut pemahaman lain, mempertimbangkan keluasan bahan bacaan, khususnya literatur yang

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

<sup>16</sup> Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian*, 54.

memiliki kaitan langsung dengan objek yang diteliti.<sup>17</sup> Maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dari beberapa buku dokumentasi yang terkait dengan peran S.M. Kartosuwirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia. Adapapun literature yang digunakan oleh penulis antara lain:

1. C Van Dijk: *DARUL ISLAM (sebuah pemberontakan)*
2. Karl D. Jackson: *Kewibawaan tradisional, Islam, dan pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*
3. Al-Chaidar: *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosowirjo (Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/DI-TII Semasa Orde Lama dan Orde Baru)*
4. Adhe Firmansyah: *S.M. Kartosuwirjo (Biografi Singkat 1907-1962)*
5. Afadla, dkk: *Islam Dan Radikalisme di Indonesia*
6. Al-Chaidar: *Wacana Ideologi Negara Islam (Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front)*
7. Kholid O. Santoso: *Jejak – Jejak Sang Petualang Pemberontak, Pemikiran, Gerakan dan Ekspresi Politik S.M Kartosuwirjo dan Daud Beureueh*
8. Holk H. Dengel: *Darul Islam dan Kartosuwirjo (Langkah Perwujudan Angan-Angan Yang Gagal)*

## 2. Kritik

---

<sup>17</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Jack, 2010), 275.



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Langkah selanjutnya adalah kritik sumber, data baik lisan maupun tulisan yang terkumpul dalam heuristik ditelusuri kembali kebenarannya melalui kritik guna memperoleh keabsahan sumber<sup>18</sup>. Kritik digunakan sebagai usaha untuk mempertimbangkan apakah suatu sumber atau data yang diproses benar-benar diperlukan atau tidak. Tujuan dilakukan kritik adalah untuk mengetahui kebenaran isi, keaslian dan keutuhan dari sumber-sumber tersebut.

Kritik sumber dilakukan dengan dua cara, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern yaitu kritik dari luar sumber untuk membuktikan keaslian bahan-bahan sejarah yang terkandung dalam sumber sejarah, seperti prasasti, dokumen, dan naskah. Bentuk penelitian yang dapat dilakukan misalnya tentang waktu pembuatan dokumen itu (hari dan tanggal) atau penelitian tentang bahan (materi) pembuatan dokumen itu sendiri. Pembuktian dapat juga dilakukan dengan menyelidiki tinta untuk penulisan dokumen guna menemukan usia dokumen. Dan pembuktian bahan sumber sejarah dapat juga dilakukan dengan mengidentifikasikan tulisan tangan, tanda tangan, materai, atau jenis hurufnya.

Selanjutnya adalah Kritik intern adalah penilaian keakuratan atau keautentikan terhadap materi sumber sejarah itu sendiri. Di dalam proses analisis terhadap suatu dokumen, penulis selalu memikirkan unsur-unsur yang relevan di dalam dokumen itu sendiri secara

---

<sup>18</sup> Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian*, 68

menyeluruh. Unsur dalam dokumen dianggap relevan apabila unsur tersebut paling dekat dengan apa yang telah terjadi, sejauh dapat diketahui berdasarkan suatu penyelidikan kritis terhadap sumber-sumber terbaik yang ada.

### 3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran terhadap sumber atau data sejarah seringkali disebut dengan analisis sejarah. Dalam hal ini data yang terkumpul dibandingkan kemudian disimpulkan agar bisa dibuat penafsiran terhadap data tersebut sehingga dapat diketahui hubungan kausalitas dan kesesuaian dengan masalah yang diteliti.<sup>19</sup>

### 4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir dari metode sejarah yakni usaha untuk merekonstruksi kejadian masa lampau dengan memaparkan secara sistematis, terperinci, utuh dan komunikatif.

Dalam penelitian ini menghasilkan sebuah laporan penelitian yang berjudul “Peranan Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia 1949-1962”

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk mempermudah pemahaman sehingga dapat menghasilkan pembahasan yang sistematis. Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, tiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Pembagian ini didasarkan atas pertimbangan adanya

---

<sup>19</sup> Ibid., 64.

permasalahan- permasalahan yang perlu diklasifikasikan dalam bagian-bagian yang berbeda.

Adapun sistematika pembahasan secara terperinci yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Dalam bab ini dipaparkan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pendekatan dan kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Pada bab kedua ini dipaparkan pokok bahasan yang menyangkut Biografi Kartosuwirjo yang meliputi: biografi S.M. Kartosuwirjo, latar belakang pendidikan S.M. Kartosuwirjo, basis politik S.M. Kartosuwirjo.

**BAB III:** Dalam bab ini dipaparkan tentang konsep Negara Islam menurut S.M. Kartosuwirjo yang meliputi: asal mula Negara Islam dan perkembangannya, dasar Negara dan sistem pemerintahan, konstitusi Negara Islam, yang meliputi: konstitusi negara Madinah, konstitusi negara Islam menurut al-Mawardi, konstitusi negara Islam menurut Kartosuwirjo.

**BAB IV:** Dalam bab ini dipaparkan tentang peran S.M. Kartosuwirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia yang meliputi: perjuangan S.M. Kartosuwirjo dalam

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mempertahankan kemerdekaan indonesia, perjuangan Kartosuwirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia, dan akhir perjuangan Kartosuwirjo.

**BAB V:** Penutup dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan dan mengemukakan saran-saran yang dianggap perlu atas permasalahan yang dibahas.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



## BAB II

### BIOGRAFI S.M. KARTOSUWIRJO

#### A. Biografi S.M. Kartosuwirjo

Untuk memahami pemikiran Kartosuwirjo sebagai seorang tokoh gerakan Islam, harus dipahami bagaimana lingkungan sosial-budaya dan masyarakat tempat ia berasal yang membentuk dan mempengaruhi pemikirannya. Sebagai seorang yang dilahirkan dari lingkungan masyarakat Jawa pesisiran, Kartosuwirjo sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial-budaya dari tradisi Jawa, yang kemudian membentuk nilai-nilai bagi gerakan dan pemikirannya, sebagaimana ia memahami dan menerjemahkan ajaran-ajaran agama Islam ke dalam gerakannya.

Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo demikian nama lengkapnya dari S.M. Kartosuwirjo, yang dilahirkan pada tanggal 7 Januari 1905 di Cepu, sebuah kota kecil antara Blora dan Bojonegoro yang menjadi daerah perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Kota Cepu ini menjadi tempat di mana budaya Jawa bagian Timur dan bagian Tengah bertemu dalam suatu garis budaya yang unik.<sup>1</sup> Untuk memahami dalam konteks yang bagaimana ia lahir dan tumbuh besar, kita perlu melihat bagaimana *setting* sejarah Indonesia di awal abad ke-20 ini. Pada awal abad ini dimulai suatu perubahan besar di Hindia Belanda (nama Indonesia ketika itu). Pada bulan Januari 1901 Ratu Wilhelmina di depan parlemen yang waktu itu anggota-

---

<sup>1</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo (Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/DI-TII semasa Orde Lama dan Orde Baru)*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), 14.

anggotanya baru terpilih, mengumumkan sebuah kebijakan program pemerintah yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan situasi dan kondisi Indonesia selanjutnya.

Ketika pemerintah kerajaan Belanda sangat menyadari betul bahwa di masa lalu sudah banyak perusahaan milik orang-orang Belanda dalam menjalankan roda perekonomiannya telah memperoleh keuntungan materi yang melimpah ruah dari Hindia-Belanda, sementara itu mereka melihat banyak sekali dari penduduk di tanah jajahan Hindia Belanda mengalami dampak eksploitasi ekonomi besar-besaran tersebut berupa kemiskinan dimana-mana. Maka timbul niat untuk sedikit mengubah kondisi yang ada. Kesadaran ini menjadikan tujuan utama pemerintah jajahan dimasa mendatang adalah bagaimana dari program itu mampu mengubah dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Dan haruslah mereka pahami bahwa selama ini bangsa Belanda *“telah berhutang budi”* kepada rakyat Hindia Belanda.

Dengan bernaung di bawah apa yang kemudian dikenal dengan Politik Etis (*Etische Politiek*), pemerintah Hindia Belanda mencoba perlahan demi perlahan menjalankan programnya membuka kesempatan bagi anak-anak Indonesia dari golongan atas untuk mengikuti sekolah-sekolah berbahasa Belanda tingkat dasar dan menengah. Seiring dengan dibukanya kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang lebih maju, maka terjadilah proses transisi masyarakat Indonesia dari tradisional ke modern. Dari generasi terdidik inilah yang nantinya

sebagai tonggak awal kebangkitan bangsa Hindia Belanda di mana kesadaran nasionalisme telah muncul di dalam hati sanubari mereka yang paling dalam.<sup>2</sup>

Ayah Kartosuwirjo yang bernama Kartosuwirjo adalah seorang mantri di kantor yang mengoordinasikan para penjual candu di kota kecil Pamotan, dekat Rembang. Pada masa itu, mantri candu sederajat dengan jabatan Sekretaris Distrik. Pada posisi inilah sang ayah mempunyai kedudukan yang cukup penting sebagai seorang pribumi saat itu. Kedudukan itu pula yang menimbulkan pengaruh sangat besar terhadap pembentukan garis sejarah anaknya. Kartosuwirjo kemudian mengikuti tali pengaruh tersebut.<sup>3</sup>

Suasana politis ini juga mewarnai pola asuh orang tuanya yang berusaha menghidupkan suasana kehidupan keluarga yang liberal. Masing-masing anggota keluarga mengembangkan visi dan arah pemikirannya ke berbagai orientasi. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Kartosuwirjo mempunyai seorang kakak perempuan yang tinggal di Surakarta pada 1950-an yang hidup dengan penuh keharmonisan. Kartosuwirjo juga mempunyai seorang kakak laki-laki yang memimpin Serikat Buruh Kereta Api ketika di Indonesia terbentuk berbagai serikat buruh pada 1920-an.<sup>4</sup>

Begitulah Kartosuwirjo, dia lahir dalam situasi yang sedemikian menguntungkan, sehingga karena kedudukan “istimewa” orang tuanya, ia termasuk

---

<sup>2</sup> Ibid., 15.

<sup>3</sup> Adhe Firmansyah, *S.M. Kartosuwirjo (Biografi Singkat 1907-1962)*, (Yogyakarta: GARASI, 2009), 11.

<sup>4</sup> Ibid., 12.

dalam salah seorang anak-anak negeri ini yang berkesempatan mengecap pendidikan modern kolonial Belanda yang sangat maju di zamannya. Maka, Belanda tidak hanya menggunakan kekuatan senjata untuk “*menjinakkan*” Indonesia.

## **B. Latar Belakang Pendidikan S.M. Kartosuwirjo**

Pendidikan formal Kartosuwirjo pada hakikatnya adalah bersifat sekuler. Tidak terdapat tanda bahwa Kartosuwirjo belajar di salah satu sekolah Islam yang banyak jumlahnya. Hal ini bertentangan bagi seorang yang selama bertahun-tahun akan menjadi pemimpin pemberontakan Islam.

Pendidikan yang diperoleh pada sekolah pertama tempat belajar Kartosuwirjo pada usia enam tahun adalah ISTK (*Inlandsche School der Tweede Klasse*), atau Sekolah Bumiputra Kelas Dua.<sup>5</sup> Standar sekolah-sekolah ini hanya sedikit di atas *Volksschool* (Sekolah Desa) biasa, yang bertujuan memberikan kepada sebagian rakyat sedikit pengetahuan dasar dan umum. Tingkatan pendidikan sekolah kelas dua, yang murid-muridnya memenuhi syarat untuk menjadi guru Sekolah Desa, walaupun sedikit lebih tinggi, masih jauh di bawah tingkatan sekolah kelas satu. Perbedaan yang pokok pada sekolah kelas satu dan sekolah kelas dua adalah diajarkannya bahasa Belanda pada sekolah kelas satu. Pengetahuan bahasa ini dalam masyarakat Kolonial Indonesia merupakan salah satu prasyarat untuk pendidikan selanjutnya dan untuk diterima dalam pekerjaan administratif. Mata pelajaran “kelas satu” mungkin

---

<sup>5</sup> Adhe Firmansyah, *S. M. Kartosuwirjo*, 12.

juga diajarkan pada “kelas dua” dengan izin khusus, tetapi pelajaran bahasa Belanda tetap dilarang tegas.

Ketika Kartosuwirjo tamat Sekolah Desa Kelas Dua selama empat tahun, ia melanjutkan pendidikannya pada sekolah-sekolah dasar kelas satu. Pada mulanya ia masuk ke Sekolah Bumiputra Bahasa Belanda (*Hollandsch-Inlandsche School*). Dan kemudian pada tahun 1919, setelah orang tuanya pindah ke Bojonegoro, ia dimasukkan ke Sekolah Dasar Eropa (*Europeesche Lagere School/ ELS*). Bagi seorang putra “pribumi” keduanya merupakan sekolah elite. Sekolah Bumiputra Bahasa Belanda (HIS) dimaksudkan untuk anak-anak anggota kelas atas masyarakat pribumi. Syarat-syarat untuk masuk ELS adalah yang paling ketat dari semuanya. Seperti dinyatakan oleh namanya, sekolah ini pertama-tama dan terutama direncanakan sebagai lembaga pendidikan untuk orang Eropa dan kalangan masyarakat Indo-Eropa, walaupun sejumlah terbatas pribumi juga diperkenankan masuk.<sup>6</sup> Di Bojonegoro inilah Kartosuwirjo bertemu Notodihardjo, tokoh Muhammadiyah setempat yang kemudian menjadi guru agamanya. Notodihardjo menanamkan banyak aspek kemodernan Islam ke alam pikiran Kartosuwirjo. Pemikiran-pemikirannya berpengaruh kuat pada sikap dan responya terhadap ajaran Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> C. Van Dijk, *DARUL ISLAM (sebuah pemberontakan)*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), 12.

<sup>7</sup> Adhe Firmansyah, *S. M. Kartosuwirjo*, 12.

Sesudah menyelesaikan ELS, kemudian Kartosuwirjo berangkat ke Surabaya untuk masuk ke Sekolah Dokter Hindia Belanda (*Nederlandsch Indische Artsen School (NIAS)*). Di sini ada dua jenjang, jenjang pertama adalah persiapan selama tiga tahun, dan lanjutan selama enam tahun. Di sinilah ia terlibat dengan aktivitas organisasi pergerakan nasionalisme Indonesia di Surabaya, antara lain *Jong Java*. Ia menghabiskan masa kuliah untuk aktifitas pergerakan.<sup>8</sup> Pada 1925, terjadi perpecahan dalam *Jong Java*, anggota-anggota *Jong Java* yang lebih mengutamakan cita-cita keislaman mendirikan JIB (*Jong Islamieten Bond*). Kartosuwirjo pun pindah ke organisasi ini karena sikap pemihakannya kepada agamanya. Melalui *Jong java* dan JIB, Kartosuwirjo menjadi salah satu pelaku sejarah gerakan pemuda yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Pemuda. Pada tahun 1925 pula ayahnya meninggal dunia.

Kartosuwirjo mulai pelajaran persiapan NIAS pada tahun 1923, yaitu pada usia delapan belas tahun. Sesudah selesai, ia diterima pada pelajaran kedokteran, tetapi karena alasan politik dia dikeluarkan dari NIAS yaitu pada tahun 1927. Ia dituduh menjadi aktivis politik dan didapati memiliki sejumlah buku sosialis dan komunis pemberian pamannya, Mas Marco Kartodikromo, wartawan dan sastrawan kenamaan pada zamannya.<sup>9</sup> Setelah keluar dari NIAS, Kartosuwirjo pulang ke Bojonegoro. Di sana ia bekerja sebagai pengajar di sebuah sekolah partikelir untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan ibunya.

---

<sup>8</sup> Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 68.

<sup>9</sup> Adhe Firmansyah, *S.M. Kartosuwirjo*, 13.

### C. Basis Politik S. M. Kartosuwirjo

Melalui keanggotaan di organisasi-organisasi pemuda Jong Java dan JIB, Kartosuwirjo berkenalan dengan tokoh Agus Salim dan Oemar Said Tjokroaminoto, pemimpin PSI (Partai Sarikat Islam) yang kharismatik, yang pandangan politiknya, terutama cita-citanya akan suatu negara Islam, dikemudian hari ternyata sangat mempengaruhi jalan pikiran Kartosuwirjo.<sup>10</sup> Dari gerakan pemuda Jong Java itulah Kartosuwirjo memulai karir politiknya.

Perkenalan Kartosuwirjo dengan Tjokroaminoto terjadi pada tahun 1915 ketika berlangsung rapat akbar Sarekat Islam di Surabaya. Kartosuwirjo menyaksikan betapa pidato-pidato Tjokroaminoto sangat memukau dan dalam sekejap dapat menghipnotis massa. Kekaguman Kartosuwirjo bahkan tidak dapat terbendung ketika seusai rapat akbar itu ia melihat massa berdesak-desakan di sekitar podium, menunggu Tjokroaminoto yang baru menyampaikan ceramah turun. Massa yang baru saja bergelora dengan sorak sorai, saling berebut untuk mencium tangannya, pundaknya, bahkan ujung baju Tjokroaminoto. Setelah massa bubar, Kartosuwirjo ikut shalat berjamaah bersama Tjokroaminoto dan menyampaikan keinginannya untuk menjadi murid pemimpin SI tersebut. Dan Tjokroaminoto menerimanya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo (Angan-Angan yang Gagal)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 8.

<sup>11</sup> Kholid O. Santoso, *Jejak-Jejak Sang Petualang Pemberontak (Pemikiran, Gerakan dan Ekspresi Politik S.M Kartosuwirjo dan Daud Beureueh)*, (Bandung: Segasorsy, 2006), 69-70.

Dua tahun sebelum Karosuwirjo tinggal bersama Tjokroaminoto, soekarno lebih dulu tinggal di sana. Pengalaman politik yang dialami Kartosuwirjo dalam banyak hal sama dengan yang dialami Soekarno. Keduanya mempunyai mentor politik yang sama, seorang nasionalis yang paling terkemuka dan populer dalam masanya : pemimpin Sarekat Islam Haji Oemar Said Tjokroaminoto (Umar Said Cokroaminoto). Keduanya tinggal di rumah Tjokroaminoto selama masa yang hampir bersamaan ketika di Surabaya dan memperoleh banyak pengalaman politik awalnya disini.

Soekarno tinggal bersama Tjokroaminoto antara 1916 dan 1921 ketika kemasyhuran Tjokroaminoto mencapai puncaknya. Hubungan antara keduanya akrab untuk sementara, tetapi keduanya menjadi asing satu sama lain sesudah Soekarno berangkat ke Bandung. Dalam suasana pribadi, hubungan yang berubah ini tercermin dalam perkawinan Soekarno dengan putri Tjokroaminoto serta perceraian mereka kemudian. Kartosuwirjo juga tinggal di rumah Tjokroaminoto dan mereka akrab. Tetapi berbeda dengan Soekarno, tidak pernah ia berselisih pendapat dengan Tjokroaminoto. Dia tetap setia kepada politiknya, maupun kepada Partai Sarikat Islam Indonesia, yang timbul dari Sarikat Islam Tjokroaminoto. Katrosuwirjo tinggal di rumah Tjokroaminoto sesudah dia dikeluarkan dari NIAS, boleh dikatakan seketika



itu juga ia menjadi sekretaris pribadi Tjokroaminoto, dan terus melanjutkan fungsi ini sampai 1929.<sup>12</sup>

Pada bulan Desember 1927 di Pekalongan, saat kongres PSIHT (Partai Sjarikat Islam Hindia Belanda Timoer). Kartosuwirjo terpilih menjadi sekretaris umum PSIHT. Kemudian diputuskan juga melalui kongres, bahwa pimpinan partai harus dipindahkan ke Batavia. Setahun kemudian tepatnya pada bulan Oktober 1928, Kartosuwirjo pernah menjadi peserta kongres pemuda Indonesia mewakili partainya di Batavia. Pada kongres tersebut Kartosuwirjo memberikan pandangan tentang hakikat pendidikan pada masa yang akan datang. Namun pandangannya itu bertentangan dengan pemikiran ketua kongres Sugondo. Sehingga, dapat sengit pun tidak dapat terelakan. Ketika Kartosuwirjo tetap mempertahankan argumentasinya, terpaksa Sugondo memukulkan palu di atas meja, maka berakhirlah perdebatan itu.<sup>13</sup>

Selain bertugas sebagai sekretaris umum PSIHT, Kartosuwirjo pun bekerja sebagai wartawan di koran harian *Fajar Asia*. Semula ia bekerja sebagai korektor, kemudian diangkat menjadi reporter. Ketika bekerja di *Fadjar Asia* ia mulai menerbitkan artikel-artikel, yang mula-mula hanya ditujukan untuk menentang bangsawan-bangsawan Jawa yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Kartosuwirjo memperhatikan nasib para petani kecil yang menyewakan tanahnya kepada perusahaan Barat atau pada kapitalis pribumi. Dia juga marah sekali atas

---

<sup>12</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam...*, 14.

<sup>13</sup> Al- Chaidar, *Pengantar Pemikiran...*, 35.

kenaikan pajak sawah hingga 90%. Ia juga mengkritik kerja rodi yang diganti dengan pembayaran tahunan, hanya karena tidak ada lagi lapangan kerja, akibat krisis ekonomi di Hindia Belanda pada masa itu.<sup>14</sup> Kartosuwirjo juga mencela hubungan orang-orang Belanda di perkebunan-perkebunan dengan wanita-wanita pribumi. Dan dia mengajak para orang kulit putih untuk menjernihkan masalah ini. Karena artikel-artikel itu, Kartosuwirjo mendapatkan banyak musuh, tetapi justru bukan di pihak kolonial, melainkan di pihak bangsanya sendiri, terutama dikalangan nasionalis yang netral agama.<sup>15</sup>

Pada tahun 1928 Kartosuwirjo banyak melakukan perjalanan ke propinsi-propinsi dalam rangka tugasnya, berkaitan dengan jabatannya sebagai Sekretaris Umum PSIHT dia mengunjungi cabang atau ranting di daerah-daerah. Dan sempat dalam tugasnya itu dia pergi ke Malangbong, di sana dia bertemu dengan pemimpin PSIHT setempat yang terkenal bernama Ajengan Ardiwisastera, yang pernah tertangkap oleh Belanda beberapa bulan karena terlibat dalam peristiwa Cimareme.<sup>16</sup> Di sana pulalah dia berkenalan dengan Siti Dewi Kalsum putri Ajengan Ardiwisastera, yang kemudian dinikahinya pada bulan April tahun 1929, di saat itu usianya lebih muda dua tahun dari Kartosuwirjo. Dengan kepindahan dia ke

---

<sup>14</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo*, 11-12.

<sup>15</sup> Ibid., 15.

<sup>16</sup> Peristiwa Cimareme terjadi pada bulan Juli 1919 di Cimareme, ketika Haji Hasan Arief dan putra-putranya menolak menyerahkan 40 pikul beras (kurang lebih 2500 Kg) sebagai pajak, dalam bentrok senjata yang terjadi, Haji Hasan Arief dan enam orang pengikutnya tewas. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh instansi kolonial terbukti, bahwa Haji Hasan Arief mempunyai hubungan dengan Afdeeling B Sarikat Islam yang telah merencanakan pemberontakan menentang Belanda. (lihat Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 35).

Malangbong, maka terangkatlah diri Kartosuwirjo menjadi orang yang sangat terpandang di daerah tersebut. Bukan hanya karena reputasi mertuanya saja yang sangat berpengaruh di daerah Malangbong, akan tetapi reputasi dia juga cukup tinggi, di mana dia pernah merasakan sekolah di NIAS, menjadi sekretaris pribadi HOS Tjokroaminoto, menjabat sebagai sekretaris umum PSIHT dan anggota staf harian *Fajar Asia*. Begitu banyak pengalaman telah menghantarkan dirinya sebagai “aktor intelektual” dalam kancah pergerakan Nasional.<sup>17</sup>

Dalam kongres partai PSIHT pada akhir tahun 1929 di Batavia, Kartosuwirjo terpilih menjadi Komisaris Partai tersebut untuk daerah Jawa Barat dan tetap menduduki posisi ini sampai pada kongres partai yang berikutnya pada akhir tahun 1931 di Surabaya.<sup>18</sup> Pada tahun 1936 ia menjadi wakil ketua. Tetapi pada waktu itu partai ini mengalami salah satu krisis yang besar, menjadi terpecah pecah oleh perpecahan intern, yang kian bertambah. Soal pokok yang merupakan pertentangan adalah sikap terhadap pemerintah kolonial dan masalah apakah PSII harus atau tidak harus bekerja sama dengan rezim kolonial. Perbedaan-perbedaan tentang hal ini diperhebat oleh rasa dendam pribadi dalam kepemimpinan partai dan oleh perebutan untuk menguasai PSII sesudah Haji Oemar Said Tjokroaminoto meninggal pada 1934.

---

<sup>17</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 35-36.

<sup>18</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo (Angan-Angan yang Gagal)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 17.

Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) merupakan kelanjutan dari Sarikat Islam (SI) yang dibentuk Haji Samanhudi pada tahun 1912 di Solo.<sup>19</sup> Sarekat Dagang Islam diubah namanya menjadi Sarekat Islam atas pertimbangan dari Haji Samanhudi yang bertukar pikiran dengan H.O.S Tjokroaminoto yang mempertimbangkan bahwa perkumpulan itu tidak terbatas sampai para pedagang saja, tetapi juga mempunyai dasar yang lebih luas sehingga orang Islam yang bukan pedagang pun bisa menjadi anggota.<sup>20</sup> Sarekat Islam (SI) tersebut didirikan sebagai perkembangan dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang ketiga. SDI yang pertama didirikan di Batavia tahun 1909, yang kedua di Bogor tahun 1911, kedua duanya atas prakarsa wartawan Raden Mas Tirtoadhisoerjo yang bercita-cita mendirikan persekutuan dagang perkoperasian Indonesia yang mampu mematahkan monopoli Cina dalam perdagangan bahan dan industri batik.<sup>21</sup>

Di dalam tubuh PSII terdapat pertentangan antara kedua kelompok besar partai, yaitu antara Dewan Eksekutif (Ladjanah Tanfidziah) di bawah pimpinan Abikusno Tjokrosujoso, adik Tjokroaminoto, dan disatu pihak Dewan Partai di bawah pimpinan H. A Agus Salim. Anggota kedua Dewan tersebut tidak sependapat dalam sikap mereka terhadap pemerintah kolonial. Sementara Abikusno memperjuangkan politik Non-Kooperasi, tidak mau bekerja sama dengan pihak kolonial sedangkan Salim cenderung pada sikap untuk bekerja sama dengan

---

<sup>19</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 40.

<sup>20</sup> Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional (Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid 1)*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), 122.

<sup>21</sup> Ali Mufrodi, *Pranata Sosial Islam Di Indonesia 1900-1945 (Politik dan Pendidikan)*, (Surabaya: Alpha, 2007), 7.

kekuasaan kolonial. Dia khawatir, kalau politik non kooperasi diteruskan, akan ada kerugian forum politik yang akan mempercepat keruntuhan partai dan dia mendesak supaya diadakan suatu referendum tentang masalah ini. Sebelum usul-usul Salim diperdebatkan pada kongres partai yang berikutnya, Abikusno telah meletakkan jabatannya sebagai ketua partai pada akhir tahun 1935.<sup>22</sup> Kartosuwirjo yang pada saat itu masih menjabat sebagai sekretaris Dewan Eksekutif (Ladjnah Tanfidziah), mengikuti langkah Abikusno dan juga meletakkan jabatannya.<sup>23</sup>

PSII memiliki tradisi nonkooperasi yang panjang usianya. Kebijakan politik tentang ini pertama-tama dirumuskan pada kongres pertama partainya pada 1923 dan 1924. Dengan menerima ilhamnya dalam gerakan *Ghandi* di India, dan karena kecewa dengan sikap pemerintah kolonial dan kekuasaan sesungguhnya yang dilimpahkan kepada Dewan Rakyat, dikembangkanlah konsep-konsep berdikari (*swadeshi*) dan dilenyapkannya struktur kolonial yang berlaku (*Hijrah*).<sup>24</sup>

Kombinasi *swadeshi* dengan *hijrah* ini membuat politik nonkooperasi PSII menarik bagi orang-orang seperti Kartosuwirjo yang menghubungkan kebencian akan rezim kolonial dengan pandangan Islam yang tegas dan kecurigaan yang dalam berakar terhadap kehidupan kota. Ia tidak hanya menghubungkan idealisasi

---

<sup>22</sup> Ibid., 17.

<sup>23</sup> Ibid., 18.

<sup>24</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam*, 20.

kehidupan desa dengan perjuangan politik yang sesungguhnya, tetapi dalam beberapa hal juga mengandung hubungan tradisi hindu dengan tradisi Islam.<sup>25</sup>

Pada kongres partai ke 22 di Batavia bulan Juli tahun 1936 Abikusno terpilih menjadi ketua partai PSII, setelah cara pemilihan pimpinan partai yang baru diberlakukan, yaitu kongres partai hanya memilih ketua partai saja. Di kongres ini terlihat jelas bahwa Abikusno lebih kuat dibandingkan dengan Agus Salim, dengan demikian Abikusno terpilih menjadi formatur, yang dapat memilih sendiri anggota-anggotanya pimpinan lainnya. Dan melalui rapat formatur ini Abikusno segera mengangkat Kartosuwirjo menjadi wakilnya. Jabatan menjadi wakil ketua PSII dipegang Kartosuwirjo sampai ia keluar dari partai dalam tahun 1939.<sup>26</sup>

Kartosuwirjo selanjutnya mengkritik Agus Salim pada kongres partai dan menuntut suatu penerapan politik *hijrah* yang tidak mengenal kompromi. Kartosuwirjo menerangkan, bahwa politik ini merupakan suatu jalan tengah antara Non-kooperasi dengan kooperasi. Kartosuwirjo ditugaskan oleh kongres untuk menyusun suatu brosur tentang sikap *hijrah* partai PSII. Setelah Abikusno terpilih menjadi ketua partai dia mengumumkan bahwa pertentangan mengenai politik *hijrah* telah berakhir dan memerintahkan semua cabang-cabang partai tersebut untuk tidak mengambil peduli pada saran-saran Salim. Dalam bulan Nopember 1936, Salim membentuk suatu fraksi sendiri dalam tubuh partai PSII di bawah pimpinan Moh.

---

<sup>25</sup> Ibid., 21.

<sup>26</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 44.

Roem. Fraksi tersebut adalah “Barisan Penjadar PSII” dan ia berharap, bahwa akhirnya nanti usul-usulnya untuk bekerja sama dengan pemerintah kolonial akan disetujui. Abikusno segera memberikan reaksi dan mengumumkan, bahwa politik *hijrah* menjadi politik resmi partai tersebut, dan dia melarang cabang-cabang partai dengan ancaman pemecatan, bila mereka mendiskusikan usul-usul Salim atau mendukung fraksi Salim.<sup>27</sup> Karena berusaha melawan tindakan tersebut dan membentuk Badan Penyadar PSII, Agus Salim dikeluarkan dari PSII, bersama dengan kira-kira 30 orang rekannya.<sup>28</sup>

Pernyataan Abikusno Tjokrosujoso bahwa kongres PSII juli 1936 telah menyetujui politik *hijrah* diuraikan secara terperinci dalam suatu brosur dua jilid mengenai masalah itu oleh Kartosuwirjo. Judulnya berbunyi “Sikap Hijrah PSII” dan, sebagai dinyatakan oleh judul tambahannya, disahkan kongres ke 22 partai. Pamflet ini tidak ditulis Kartosuwirjo atas prakarsanya sendiri tetapi atas permintaan kongres 1936. Kata pengantar untuk jilid kedua, yang ditandatangani oleh Abikusno Tjokrosujoso sebagai presiden dan Aruji Kartawinata sebagai sekretaris PSII, memuat pernyataan bahwa “pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, dan gagasan-gagasan tentang penafsiran tentang sikap hijrah PSII yang diuraikan dalam brosur ini dibicarakan panjang lebar dengan Presiden Terpilih Dewan Pimpinan Partai dan Komite Eksekutif Partai sebelum dan sesudah (pamflet ini) ditulis oleh pengarang”.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo*, 18.

<sup>28</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam*, 23.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 23-24.

Ketika menulis pamfletnya, Kartosuwirjo masih mendapat dukungan resmi untuk tafsiran *Hijrahnya* dari dewan pimpinan PSII, seperti ternyata dari persetujuan yang dinyatakan dalam kata pengantar dalam brosurnya oleh Abikusno Tjokrosujoso dan Aruji Kartawinarta. Tapi, dalam beberapa tahun situasi jadi berubah. Pada 1939 ternyata kartosuwirjo terlibat dalam pertengkaran yang sengit dengan mayoritas pimpinan PSII yang diketuai Abikusno Tjokrosujoso. Lagi-lagi soal yang dimasalahkan adalah sikap partai *vis a vis* Pemerintah Kolonial. Kartosuwirjo tetap menjadi pendukung yang tidak kenal kompromi mengenai *hijrah* yang radikal seperti dahulu ternyata kini ditentang oleh sekutu-sekutunya hanya beberapa tahun yang lampau, yang banyak mengubah sikapnya agar dapat mengatasi tekanan pemerintah yang makin mendesak. Kartosuwirjo tidak menyetujui putar haluan PSII, yang mengakibatkan turut sertanya PSII pada 1939 dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia) suatu federasi partai politik Indonesia dengan Abikusno Tjokrosujoso sebagai ketua umumnya. Selanjutnya dia dengan keras menentang tindakan yang diprakarsai GAPI dan didukung PSII untuk membentuk parlemen yang benar-benar representatif, walaupun pada waktu itu dia telah dikeluarkan dari partai secara resmi.<sup>30</sup>

Perubahan politik PSII dari garis nonkooperasinya yang dulu membuat brosur Kartosuwirjo begitu besar nilainya pada tahun 1936 dan 1937 untuk menghadapi pengaruh Agus Salim, kini sudah tidak berguna dan bahkan bertentangan dengan

---

<sup>30</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam*, 25.



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

politik partai. Pikiran-pikiran yang dikemukakan Kartosuwirjo disini dicap sebagai anakronisme, dan sipenulis diminta menarik kembali dan menghentikan penyebaran brosur tersebut. Dan karena menolak berbuat demikian, Kartosuwirjo dikeluarkan dari PSII bersama-sama dengan sejumlah rekannya. Maka untuk mempertahankan kebenaran sikap PSII, Kartosuwirjo dengan anggotanya yang sealiran antara lain Jusuf Taujiri, dan Kamran membentuk partai baru yaitu Komite Pembela Kebenaran PSII (KPK-PSII). Karena dimaksudkan untuk bergerak di dalam PSII. Pada awal tahun 1939 Dewan Eksekutif PSII mengeluarkannya dari partai, yang sebelum pemecatan Kartosuwirjo dituduh telah menyalahgunakan uang partai. Dengan tindakan yang sepihak dari partai ini kartosuwirjo tidak menghiraukannya dan terus melanjutkan rencananya semula untuk melaksanakan program aksi *hijrah* dan pembentukan lembaga pendidikan kader.<sup>31</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada kongres partai yang ke 25 pada bulan Januari 1940 di Palembang, melalui keputusan yang diambil komite eksekutif partai, maka resmilah pemecatan Kartosuwirjo, Jusuf Taujiri, Akis, Kamran, dan Sukoso dengan perimbangan 134 suara setuju, sembilan suara netral. Dan diputuskan juga dalam kongres tersebut bahwa pelaksanaan program aksi *hijrah* tidak lagi diteruskan dan komisi yang sebelumnya ditugaskan untuk menyusun program ini, akan dibubarkan. Serta semua anggota PSII dilarang untuk memasuki partai yang dibentuk oleh Kartosuwirjo.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 47.

<sup>32</sup> Ibid., 48.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada rapat umum komite di Malangbong pada 24 Maret 1940 diputuskan untuk membentuk partai yang bebas. Maksud yang terkandung sesungguhnya di belakang ini adalah bahwa komite akan berkembang menjadi PSII yang sebenarnya. Karena PSII Abikusno Tjokrosujoso dirasakan terdiri dari orang-orang yang telah mengkhianati perjuangan masyarakat Islam yang sebenarnya dan dengan demikian tidak layak lagi menggunakan nama Partai Sarekat Islam Indonesia. Partai yang baru dengan Kartosuwirjo sebagai ketua, yang kadang-kadang disebut sebagai “PSII kedua”.<sup>33</sup>

Menurut Horikoshi, pada sidang KPK-PSII yang pertama dalam bulan Maret 1940, dihadiri oleh enam cabang PSII yang lama dari Jawa Barat di antaranya dari Cirebon, Cibadak, Sukabumi, Pasanggrahan, Wanaraja dan Malangbong. Dalam sidang itu, keluar juga *Daftar Oesaha Hidjrah PSII* yang penyusunnya ditugaskan kepada Kartosuwirjo ketika dia masih menjabat sebagai wakil ketua PSII. *Daftar Oesaha Hidjrah PSII* tersebut masih keluar dengan judul aslinya dan dicetak oleh penerbitan yang didirikan oleh Kartosuwirjo di Malangbong, yaitu “*Poestaka Darul Islam*.” Penerbitan ini memainkan peran penting dalam aksi informasi dari sebuah gerakan. Kartosuwirjo juga masih merencanakan untuk menerbitkan suatu penafsiran tentang program tersebut (*Tafsir Daftar Oesaha Hidjrah*) tetapi rencana itu tertunda. Dalam kata pengantar brosurinya, Kartosuwirjo tidak menyebut pemecatan dirinya dari PSII yang terjadi sebelumnya dan juga tidak menyinggung bagaimana terjadinya

---

<sup>33</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam*, 26.

pembentukan KPK-PSII. Bahkan dia memberi kesan, bahwa dia sekarang mewakili PSII yang sebenarnya. Dia hanya menyayangkan, bahwa *Daftar Oesaha Hidjrah PSII* tidak lagi dapat diterbitkan sebelum berlangsungnya kongres PSII di Surabaya seperti yang direncanakan.<sup>34</sup>

Rencana Kartosuwirjo diterima kongres PSII kedua Maret 1940 yang mengesahkan sebuah resolusi untuk mendirikan apa yang disebut *Institut Supah* atau *Suffah*, dengan bertempat di Malangbong.<sup>35</sup> Lembaga Suffah tersebut dia bentuk dalam gaya sebuah pesantren tradisional, dimana para siswanya juga bertempat tinggal di sana. Kartosuwirjo mengajar mereka menurut metode H.O.S Tjokroaminoto yang berarti bahwa para siswa disamping mendapat pengajaran pengetahuan umum dan pendidikan agama Islam juga dididik dalam ilmu politik.<sup>36</sup>

Kartosuwirjo sendiri mengajarkan bahasa Belanda, Astrologi, dan *Ilm al-tawhid* atau doktrin keesaan Tuhan.<sup>37</sup> Lembaga ini tidak hanya menampung murid-murid yang berasal dari daerah-daerah di sekitar Jawa Barat, tetapi juga siswa-siswa dari daerah lain, seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan dari pelosok-pelosok pulau Jawa.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 48.

<sup>35</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam*, 28.

<sup>36</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo*, 25.

<sup>37</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam*, 29.

<sup>38</sup> Kholid O. Santoso, *Jejak-Jejak Sang Petualang*, 76.

Tanggal 1 Maret 1942 tentara Jepang mendarat di Jawa.<sup>39</sup> Ketika itu bala tentara Jepang dipimpin oleh Kolonel Shoji masuk ke wilayah Jawa Barat lewat Eretan dekat Subang, mereka terus memobilisasi pasukan untuk terus bergerak menuju pusat pemerintahan kolonial di Bandung. Bersamaan dengan kejadian itu Kartosuwirjo masih tetap berada di Malangbong, di jantung Jawa Barat sehingga tidak langsung merasakan pengaruh perang tersebut. Pada tanggal 9 Maret 1942 Jepang berhasil menaklukkan Belanda, maka mulailah Jepang melanjutkan politik yang pernah dijalankan oleh Belanda. Berbeda dengan Belanda pemerintah Jepang mengadakan perubahan politik *divide and rule* pecah-belah untuk dikuasai. Karena Jepang sangat paham tentang peta kekuatan politik yang sedang berkembang saat itu. Di mana dalam pandangan politiknya, di Indonesia ada dua kekuatan yang sedang bertarung dalam menentukan masa depan negerinya, yaitu Nasionalis Islam dan Nasionalis yang non-Islam.<sup>40</sup>

Pada tahun 1943 Kartosuwirjo kembali aktif dibidang politik. Dia masuk sebuah organisasi kesejahteraan dari MIAI (*Madjlis Islam 'Alaa Indonesia*) di bawah pimpinan Wondoamiseno, sekaligus menjadi sekretaris dalam Majelis *Baitulmal* pada organisasi tersebut. Kegiatan yang dilakukannya adalah mengunjungi cabang-cabang *Baitulmal* di setiap daerah terutama di daerah Priangan. Tetapi organisasi ini hanya berjalan selama enam bulan saja, karena pada bulan Oktober 1943 dibubarkan yang

---

<sup>39</sup> Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 34.

<sup>40</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 53.

selanjutnya mengadakan fusi ke Masyumi (Madjlis Syuro Muslimin Indonesia) yang didirikan pada tanggal 11 Nopember 1943,<sup>41</sup> dengan pimpinan ketua Pengurus Besar K.H. Hasyim Asy'ari, dengan wakil dari Muhammadiyah K.H. Mas Mansur, K.H. Farid Ma'ruf, K.H. Mukti, Kartosudarmo, dan dari NU K.H. Nachrowi, Zainul Arifin, dan K.H. Muchtar.<sup>42</sup> dan Kartosuwirjo sendiri masuk menjadi anggota organisasi baru ini.

Pembubaran MIAI pada bulan Oktober 1943 mungkin dipandang perlu oleh orang-orang Jepang karena organisasi itu didirikan atas prakarsa kaum Muslimin sendiri, sebagai suatu federasi organisasi-organisasi Islam. Para pemimpin organisasi itu mempunyai latar belakang sikap anti-kolonial dan tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial, bersikap anti-asing, dan karena itu mungkin sekali menjadi anti-Jepang. Di pihak lain, Masyumi yang mulai aktif tanggal 1 Desember 1943 dalam kenyataannya merupakan suatu ciptaan pejabat-pejabat Jepang.<sup>43</sup> Daftar panjang tujuan dan tuntutanannya harus memberikan jalan kepada satu-satunya tujuan Masyumi, yaitu "memperkuat kesatuan semua organisasi Islam", dan "membantu Dai Nippon dalam kepentingan Asia Timur Raya".<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid., 55.

<sup>42</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia VI (Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia 1942-1998)*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008), 40.

<sup>43</sup> B. J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1985), 13.

<sup>44</sup> H. J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari terbit: Islam Indonesia pada masa Pendudukan Jepang*, (terj. Daniel Dhakidae), (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), 185.

Pada bulan Februari 1944, Jepang menciptakan sebuah alat kontrol yang baru dengan mendirikan *Jawa Hokokai*, yaitu Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa sebagai pengganti “Putra” (Pusat Tenaga Rakyat), dan dalam perhimpunan ini para politikus Indonesia diintegrasikan. Kartosuwirjo pada saat itu bekerja di kantor pusat *Jawa Hokokai* (Jawa Hokokai Chuo Honbu) di bagian *Chosaka* yang tugasnya ialah untuk mengumpulkan data-data ekonomi dan informasi lainnya yang penting. Pada masa itu Kartosuwirjo sering ditugaskan ke provinsi dimana ia harus mengontrol penyerahan beras yang harus dilakukan rakyat setempat. Karena itu ia sering berada di perjalanan, tetapi tidak pernah meninggalkan kantornya lebih dari satu minggu. Tujuan pertama perjalanan kontrolnya tersebut tentu saja Priangan di Jawa Barat. Dengan demikian ada kesempatan bagi Kartosuwirjo untuk melanjutkan hubungannya dengan teman-teman lamanya dari KPK-PSII yang semuanya tinggal di Jawa Barat.<sup>45</sup>

Begitu banyak kegiatan politik yang dilakukan oleh Kartosuwirjo, dan itu merupakan basik yang akan membantu kartosuwirjo untuk melanjutkan rencananya mendirikan Negara Islam Indonesia.

---

<sup>45</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo*, 40-41.

### BAB III

## KONSEP NEGARA ISLAM MENURUT KARTOSUWIRJO

### A. Asal Mula Negara Islam dan Perkembangannya

Pengertian negara menurut R. Kranen Burg adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan kelompok manusia yang disebut bangsa. Adapun menurut Logeman, negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa: Negara bisa berdiri jika memenuhi unsur-unsur pokok yaitu, umat, teritorial (luas tanah), dan pemerintah. Yang disebut negara Islam adalah jika suatu negara dipimpin oleh seorang khalifah yang menerapkan hukum syara'. Negara Islam merupakan kekuatan politik praktis yang berungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Negara Islam inilah satu-satunya *tariqah* yang dijadikan Islam untuk menerapkan sistem dan hukum-hukumnya secara menyeluruh dalam kehidupan dan masyarakat.<sup>1</sup> Menurut Fazlur Rahman, negara Islam adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat muslim itu dalam rangka memenuhi keinginan mereka dan tidak untuk kepentingan lain. Maksud

---

<sup>1</sup> H. Moh. Toriquddin, *Relasi Agama dan Negara (Dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer)*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 36-38.

dari “keinginan mereka” adalah untuk melaksanakan kehendak Allah sebagaimana tercantum dalam wahyu Allah.<sup>2</sup>

Sejarah Islam mengungkapkan kepada kita bahwa Rasulullah telah berjuang semaksimal mungkin dengan mengerahkan kekuatan dan pikiran, yang ditopang hidayah wahyu, untuk mendirikan *Daulah Islam* atau Negara Islam bagi dakwah beliau serta penyelamat bagi pengikut beliau. Orang-orang yang beriman tidak cukup hanya beriman saja, melainkan harus berhijrah dan berjihad memperjuangkan tegaknya *Dinullah* dengan mengumpulkan segenap kekuatan dan kekuasaan. Negara adalah bentuk konkrit dari kekuatan dan kekuasaan itu. Kekuasaan itu sangat ajaib. Kita bisa berbuat apa saja dengan kekuasaan. Namun hanya kekuasaan yang berdasarkan Islam sajalah yang dapat dijamin akan memuaskan semua orang. Tidak ada bentuk kekuasaan yang diterapkan atas manusia kecuali, mengutip istilah Yusuf Qardhawy, “kekuasaan syariat.” Banyak yang menyebut kekuasaan berdasarkan syariat ini sebagai “theo-demokrasi” atau “Demokrasi Islam”. Namun, di Indonesia, S.M Kartosoewirjo secara tegas menyatakan bentuk kekuasaan itu sebagai Negara *Al-Jumhuriyah Al-Indonesiah* atau suatu *Al-daulatul Islamiyah* atau dengan sebutan *Darul Islam* yang secara nasional dikenal dengan nama Negara Islam Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 85.

<sup>3</sup> Al- Chaidar, *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo (Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/DI-TII semasa Orde Lama dan Orde Baru)*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), IX.



Rasulullah saw melaksanakan tugas risalahnya selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dakwah dalam periode Mekah ditempuh melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah dakwah secara diam-diam. Yang menjadi dasar dimulainya dakwah ini adalah Surat *Al-muddatstsir* ayat satu sampai tujuh. Dalam tahap ini Rasulullah mengajak keluarga yang tinggal serumah dan sahabat-sahabat terdekatnya agar meninggalkan agama berhala dan beribadah hanya kepada Allah semata.<sup>4</sup> Tahap kedua adalah dakwah semi terbuka. Dalam tahap ini Rasulullah meyeru keluarganya dalam lingkup yang lebih luas berdasarkan Surat *Al-Syu'ara* ayat 214, yang menjadi sasaran utama seruan ini adalah Bani Hasyim. Setelah itu Rasulullah memperluas jangkauan seruannya kepada seluruh penduduk Mekah setelah turun ayat *al-Hijr* ayat 15. Langkah ini menandai dimulainya tahap ketiga, yaitu dakwah terbuka. Sejak saat itu Islam mulai menjadi perhatian dan pembicaraan penduduk Mekah. Dalam pada itu, Rasulullah terus meningkatkan kegiatannya dan memperluas jangkauan seruannya, sehingga tidak lagi terbatas kepada penduduk Mekah, melainkan kepada setiap orang yang datang ke Makkah terutama pada musim haji.<sup>5</sup>

Di Mekah Rasulullah tidak lantas menemukan jalan mulus setelah mengumumkan misi da'wahnya. Para saudagar kaya di kota ini, sangat membenci munculnya individu dengan kedudukan yang dimuliakan. Di sini Rasulullah dan para pengikutnya mendapat penyiksaan, tidak hanya siksaan dan hinaan yang ditimpakan

---

<sup>4</sup> Siti Maryam, *Sejarah Peradaban Islam (Dari Masa Klasik Hingga Modern)*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), 25.

<sup>5</sup> Ibid., 26.

kepada Rasulullah, melainkan juga rencana pembunuhan terhadap Rasulullah. Menghadapi tekanan berat itu Rasulullah menganjurkan para pengikutnya untuk berhijrah ke Habsyi, dan kaum muslimin mendapatkan perlindungan di sana. Mendengar kaum muslimin hijrah ke Habsyi, para kafir Quraisy mengutus Amr bin Ash dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah ke Habsyi, memohon raja Habsyi untuk mengembalikan kaum muslimin ke Mekah tetapi permintaan kaum kafir Quraisy ditolak oleh raja Habsyi.

Pada bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian, paman beliau, Abu Thalib meninggal dunia. Sekitar dua atau tiga bulan setelah Abu Thalib meninggal dunia, *Ummul Mukminin*, Khadijah Al-Kubra juga meninggal dunia, tepatnya pada bulan Ramadhan tahun kesepuluh dari kenabian di usia 65 tahun.<sup>6</sup> Dengan meninggalnya dua orang pembela Rasulullah, orang-orang Quraisy semakin berani melakukan penghinaan, bahkan penganiayaan terhadap beliau. Ketika itu, Rasulullah mencoba pergi ke Thaif untuk menyampaikan dakwah kepada para pemuka kabilah di sana. Tetapi upaya itu gagal bahkan mereka mengusir Rasulullah dari sana.<sup>7</sup> Setelah Bai'ah Aqabah kedua tindakan kekerasan terhadap kaum muslimin makin meningkat, bahkan musyrikin Quraisy sepakat akan membunuh Rasulullah. Menghadapi kenyataan tersebut Rasulullah menganjurkan para sahabatnya untuk segera pindah ke Yatsrib.

---

<sup>6</sup> Amirullah Kandu, *Ensiklopedi Dunia Islam (Dari Masa Nabi Adam a.s Sampai Dengan Abad Modern)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 771.

<sup>7</sup> Siti Maryam, *Sejarah Peradaban Islam*, 28.

Sejak kedatangan Rasulullah, Yatsrib berubah namanya menjadi *Madinah al-Rasul* atau *al-Madinah al-Munawwarah*.

Di Madinah, Rasulullah memulai masyarakat Muslimnya yang pertama. Hukum-hukum dan peratran-peraturan yang mengatur suatu masyarakat diformulasikan dan ini masih berpengaruh pada umat Islam masa kini.<sup>8</sup> Negara yang beliau dirikan ini secara umum dikenal sebagai negara Islam pertama.<sup>9</sup> Pada tahun pertama Hijriyah (622 M), Rasulullah saw bersama-sama dengan para sahabatnya telah membuat suatu “Perjanjian Masyarakat” (Kontrak Sosial) dengan seluruh penduduk Madinah dan sekitarnya, baik yang muslim maupun nonmuslim. Perjanjian masyarakat ini terkenal dengan nama *Piagam Madinah* atau “*Piagam Nabi Muhammad saw.*” Perjanjian ini dibuat sebagai proklamasi lahirnya Negara Islam yang selama zaman Makkah telah dibangun dalam hati kaum Muslimin. Karena digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id *Piagam Madinah* dibuat secara tertulis, secara historis piagam itu merupakan “perjanjian masyarakat” tertulis tertua di dunia.<sup>10</sup> *Piagam Madinah* merupakan landasan dasar sebuah konsep politik dan kenegaraan pertama di dunia Islam yang mengatur tatanan sosial, ekonomi, politik dan kenegaraan, bahkan badan militerpun

---

<sup>8</sup> Akbar S. Ahmed, *Rekonstruksi Sejarah Islam (Di Tengah Pluralitas Agama dan Peradaban)*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), 29.

<sup>9</sup> Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 45.

<sup>10</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 19.

masuk di dalamnya.<sup>11</sup> Setelah Rasulullah wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh para sahabat Rasulullah.

Konsep negara Islam mengalami perubahan seiring berubahnya kondisi sejarah. Di awal kemunculannya, negara Islam merupakan organisasi kolektif non-represif di lingkungan Arabia yang semi-nomaden dan bersuku-suku. Namun, dikemudian hari ia berubah menjadi negara feodal yang sangat represif. Ini bermula ketika penaklukan demi penaklukan telah memindahkan pusat kekuasaan dari kota-kota suci Arabia ke jantung wilayah feodalisme. Dalam situasi sejarah yang berubah itu, dengan munculnya kekuatan-kekuatan produktif baru, komposisi sosial yang lama juga mengalami perubahan menyolok, demikian pula dengan karakter negara. Sistem pemilihan pada masa kekhalifahan awal telah diganti dengan jabatan raja yang turun-temurun. Bahkan di masa selanjutnya, para Sultan yang merebut kekuasaan dengan kekuatan bersenjata, mulai memegang kekuasaan riil.<sup>12</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, menurut Wahbah az-Zuhaili, seorang ahli hukum Islam kontemporer dari Damaskus, Suriah, terdapat dua kriteria untuk menentukan suatu negara adalah Darul Islam atau negara Islam. Pertama, suatu negara bisa dikatakan negara Islam jika mayoritas rakyatnya beragama Islam. Logikanya, jika mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam sistem demokrasinya negaranya akan dipimpin oleh seorang yang beragama Islam. Ia tidak menyebut

---

<sup>11</sup> Zakki Fuad, *Negara Islam atau Negara Nasional (Pemikiran Fundamental vs Liberal)*, (Kediri: Jenggala Pustaka Utama, 2007), 4.

<sup>12</sup> Asghar Ali Engineer, *Devolusi*, 142-143.

status hukum yang berlaku di negara tersebut. Kedua, suatu negara juga disebut negara Islam jika hukum Islam di terapkan, sekalipun tidak semua warganya beragama Islam. Contoh negara Islam dengan kriteria pertama di zaman sekarang adalah Mesir, Turki dan Indonesia. Adapun contoh untuk kriteria kedua adalah Iran dan Pakistan. Kedua bentuk kriteria inilah yang diakui sekarang oleh OKI (Organisasi Konferensi Islam).<sup>13</sup> Seorang muslim hendaknya meyakini bahwa tidak ada sistem ketatanegaraan yang lebih baik selain menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan hukum bernegara melalui sistem khilafah islamiyah.<sup>14</sup>

## **B. Dasar Negara dan Pemerintahan**

Menurut ajaran Islam, bahwa manusia adalah “pemegang amanah Allah” untuk mengurus kerajaan bumi, sedangkan negara dan kedaulatannya itu sendiri adalah milik Allah. Negara yang demikian sifatnya, dibangun dengan nama dan mandat Tuhan Esa untuk kesejahteraan umat manusia, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Karena itu “dua unsur utama Islam” menjadi dasarnya, yaitu:

- 1) Tauhid (Ke-Esa-an Allah)
- 2) Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan dalam Islam)

Kedua dasar ini tersimpul dalam ayat-ayat al-Qur'an yang tersebut di bawah ini:

---

<sup>13</sup> Nina M. Armando (et al), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 85.

<sup>14</sup> Abu Abdul Fattah Ali Ben Haj & Muhammad Iqbal, *Negara Ideal Menurut Islam (Kajian Teori Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Modern)*, (Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia, 2001), 21.

*“Bersatulah dalam ikatan tali Allah, jangan berpecah belah, kenangkan sejenak nikmat Allah kepadamu di waktu kamu bermusuhan-musuhan lantas Allah menanamkan cinta kasih dalam hatimu, sehingga dengan kurnia Allah itu kamu menjadi bersaudara kembali, dan ketika kamu berada di tepi jurang neraka lantas Allah membebaskan daripadanya. Demikianlah caranya Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, semoga kamu mendapat petunjuk, dan hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat yang mengajak manusia ke jalan kebaikan dan menyuruh mereka berbuat ma'ruf serta mencegah mereka dari berbuat mungkar, mereka itulah umat yang beruntung”. (Ali Imran: 103-104)<sup>15</sup>*

Kartosuwirjo menawarkan konsep kenegaraan Islam yang telah disusun dalam berbagai refrensi selama proses perjuangannya di SI maupun Masjumi sampai didirikannya DI/TII. Diantaranya tersebar dalam artikel surat kabar “*Soeara PSIF*”, surat kabar “*Soeara MIAF*”, “*Sikap Hidjrah PSII 1 dan 2*”, “*Haluan Politik Islam*”, “*Pedoman Dharma Bakti*”, dan “*Daftar Oesaha Hidjrah*”.

Sebagian besar brosurnya (*Sikap Hidjrah PSII 1 dan 2*) ditujukan pada pembahasan arti dan maksud *hijrah*. Dibedahnya Al-Qur'an yang memuat kata *hijrah* dan dijelaskan artinya dalam konteks yang relevan. Penafsiran dan pandangan Kartosuwirjo tentang perubahan konsep pada konteks kolonial sangat teliti dan jauh jangkauannya. Dengan mendasarkan diri pada Al-Qur'an dinyatakan *hijrah* sebagai kewajiban “semua pria dan wanita, tua dan muda,” kecuali mereka yang lemah, dan *hijrah* tidak boleh dihentikan “sebelum *falah* (keselamatan) dan *fatah* (kemenangan atau pembukaan) tercapai.”<sup>16</sup>

<sup>15</sup> A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 51.

<sup>16</sup> Lihat “*Sikap Hidjrah PSIF*” dalam Al-Chaidar, *pengantar Pemikiran Politik Proklamator S.M Kartosuwirjo* (Jakarta: Darul Falah, 1999), 46.

Dalam brosurnya jilid 1, Kartosuwirjo membahas hubungan antara manusia dan agama, begitu juga antara agama dan politik. Sejarah PSII antara tahun 1912-1936 dia bagi dalam tiga tahap, tahap 1, zaman qualijah yaitu antara tahun 1912-1923. Pada tahap ini perhatian partai kebanyakan ditujukan pada hal-hal duniawi. Tahap yang kedua adalah zaman fi'biyah yaitu antara tahun 1923-1930, suatu zaman peralihan, dan tahap ketiga adalah zaman i'tiqadiyah setelah tahun 1930. Pada tahap ini manusia sadar akan kewajiban-kewajiban agamanya. Kartosuwirjo menyebutkan syarat-syarat yang dipenuhi untuk menciptakan suatu dunia Islam yang murni. Dalam dunia Islam manusia harus menjalankan perintah-perintah Allah dan Nabi-Nya secara sungguh-sungguh dan benar.<sup>17</sup>

Dalam jilid II, Kartosuwirjo menjelaskan penafsiran arti-arti *hijrah*, yang bagi PSII merupakan kewajiban dan yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan manusia. Berbeda dengan non-kooperasi yang mempunyai arti yang lebih negatif, *Hijrah* merupakan sikap yang positif, demikian Kartosuwirjo. Dia juga menentang pendapat yang tersebar luas di Barat, bahwa jihad selalu harus berarti perjuangan fisik. Dia membedakan dua macam jihad, yaitu jihad kecil (jihad ul asghar) untuk melindungi agama terhadap musuh-musuh luar, dan jihad besar (jihad ul akbar) yang ditujukan untuk memerangi musuh dalam dirinya manusia itu sendiri.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat "Sikap Hidjrah PSII jilid 1" dalam Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran.*, 46.

<sup>18</sup> Lihat "Sikap Hidjrah PSII jilid 2" dalam Al-Chaidar, *pengantar pemikiran*, 46-47.

Pada sidang KPK-PSII bulan Maret 1940, keluar juga “*Daftar Oesaha Hidjrah PSII*” yang disusun oleh Kartosuwirjo ketika dia masih menjabat sebagai wakil ketua PSII. *Daftar Oesaha Hidjrah PSII* tersebut masih keluar dengan judul aslinya dan dicetak oleh penerbitan yang didirikan oleh Kartosuwirjo di Malangbong, yaitu “*Poestaka Darul Islam.*”

Dalam bab satu brosurnya, Kartosuwirjo membahas struktur masyarakat yang menurut dia terdiri dari tiga macam masyarakat yang berbeda-beda dalam hukum dan haluannya, dalam susunan dan aturannya dan dalam sikap dan pendiriannya, tetapi hidup bersama-sama dalam satu negeri. Ketiga macam masyarakat tersebut adalah masyarakat Hindia Belanda atau “*masyarakat kejajahan*” yang berkuasa, berikutnya adalah masyarakat Indonesia yang belum mempunyai hukum maupun hak dan tidak mempunyai pemerintahan sendiri, dan yang ketiga adalah masyarakat Islam atau digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id “*Darul Islam.*” Perbedaan antara masyarakat indonesia dan masyarakat Islam menurut Kartosuwirjo adalah sebagai berikut:

“...masjarakat kebangsaan Indonesia mengarahkan langkah dan sepak terdjangnja ke djoeroesan Indonesia Raja, agar soepaja dapat berbakti kepada Negeri Toempah darahnja, berbakti kepada Iboe Indonesia. Sebaliknya, kaoem Moeslimin jang hidoep dalam masjarakat Islam atau Daroel Islam,”tidaklah mereka ingin berbakti kepada Indonesia atau siapa poen djoega, melainkan mereka hanja ingin berbakti kepada Allah jang Esa belaka”. Maksoed toedjoeanja tiap-tiap Moeslim dan Moeslimah dapat melakoekan hoekoem-



hoekoem agama Allah (Islam), dengan seloeas-seloesnya, baik jang berhoeboengan dengan sjahsijah maoepoen idjtima'ijah.”<sup>19</sup>

Pada bab berikutnya, Kartosuwirjo menyebutkan alasan-alasan turunnya “harkat derajat manusia atau bangsa”, yaitu karena “membelakangkan dan membohongkan agama Allah”. Kartosuwirjo mengharapkan persatuan dunia Islam dengan umatnya secara keseluruhan. Dan dia yakin, hanya dengan cara demikian dapat tercipta suatu dunia baru atau “Darul Islam”. Program aksi *Hijrah* dia bagi dalam bidang-bidang politik, sosial, ekonomi, ibadah dan satu bidang tentang mistik Islam serta “ajaran Islam yang lainnya.” Dalam bagian tentang politik dia tanpa memberi keterangan lebih lanjut hanya menyebut Politik Islam Nasional, Politik Islam Internasional dan Politik Islam terhadap dunia non Islam. Selanjutnya Kartosuwirjo menulis bahwa:<sup>20</sup>

“kalaoe kita hidjrah dari Mekkah Indonesia ke Madinah Indoensia..., boekanla sekali-kali kita haroes berpindah kampoeng dan negeri beralih daerah dan wilayah, melainkan hanjalah di dalam sifat, thabi'at, amal, itiqad dan lain-lain sebagainya. Untuk mencapai Darul Islam yang sesempurna-sempurnanya, tulis Kartosuwirjo selanjutnya, manusia harus melepaskan “sifat, thabi'at dan laku ke-Mekkah-an dan beralih kepada sifat, thabi'at dan laku ke-Madinah-an.”

Tentang perekonomian dia menerangkan, bahwa sistem perekonomian harus berlandaskan pada solidaritas dan kolektivitasme. Harta yang berlebihan daripada

---

<sup>19</sup> Lihat “*Daftar Oesaha Hidjrah*” dalam Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo (Angan-angan yang gagal)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 24.

<sup>20</sup> Lihat, “*Daftar Oesaha Hidjrah*” dalam Holk H. Dengel, *Darul Islam*, hal. 24-25.

keperluan masing-masing atau rumah tangga haruslah disetorkan ke dalam tempat perbendaharaan umum seperti *baitul mal* yang kemudian akan digunakan untuk membantu mereka yang berekonomi lemah. Dengan cara demikian tidak terdapat penumpukan kekayaan yang berlebihan dan kemiskinan akan dapat diperangi. Kartosuwirjo menulis bahwa, “*Ini adalah gambaran doenia Islam jang kita inginkan.*”<sup>21</sup>

Demikian Kartosuwirjo menjabarkan konsep negara Islam Indoensia melalui brosur-brosur yang telah ia susun untuk menciptakan suatu negara bagi kaum muslimin di zaman yang baru, zaman yang terang, karena sorotnya Nur Ilahi.

### **C. Konstitusi Negara Islam**

#### **1. Konstitusi Negara Madinah**

Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi hijrah ke Yathrib, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Di Madinah untuk pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi, dan terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Makkah (Muhajirin) dan penduduk madinah yang telah memeluk Islam (Ansar). Tetapi umat Islam pada masa itu bukan satu-satunya komunitas di Madinah. Di antara penduduk Madinah terdapat juga komunitas-komunitas lain, yaitu orang-orang Yahudi dan sisa suku-suku Arab yang belum mau menerima

---

<sup>21</sup> Lihat, “*Daftar Oesaha Hidjrah*” dalam Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 49.

Islam dan masih tetap memuja berhala. Dengan kata lain, umat Islam di Madinah merupakan bagian dari suatu masyarakat majemuk.<sup>22</sup>

Tidak lama setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad membuat suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya. Kesatuan hidup yang baru dibentuk itu dipimpin oleh Nabi Muhammad sendiri, dan menjadi negara yang berdaulat. Dengan demikian, di Madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya menjadi Rasul Allah, tetapi juga menjadi Kepala Negara.<sup>23</sup> Perjanjian (kesepakatan) inilah yang dinamai dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan sebuah kesepakatan hidup bersama secara damai. Perjanjian Madinah ini mengatur kelompok yang tinggal di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW, baik muslim, nonmuslim, maupun kaum lain.<sup>24</sup>

Inisiatif dan usaha Nabi Muhammad untuk mengorganisir dan mempersatukan pengikutnya dan golongan lain, menjadi suatu masyarakat yang teratur, berdiri sendiri, dan berdaulat yang akhirnya menjadi suatu negara di bawah pimpinan beliau sendiri merupakan praktek *siyasah*, yakni

---

<sup>22</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, (Jakarta: UI Press, 1990), 9-10.

<sup>23</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Muadinah dan Undang-Undang Dasar 1945 (Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk)*, (Jakarta: UI Press, 1995), 2.

<sup>24</sup> Nina M. Armando (et al.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 304.



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

proses dan kebijakan untuk mencapai tujuan. Masyarakat ini dibentuk berdasarkan perjanjian tertulis yang disebut *shahifah* dan *kitab*.<sup>25</sup>

Perjanjian tertulis itu oleh kebanyakan penulis dan peneliti sejarah Islam serta pakar politik Islam disebut sebagai konstitusi negara Islam pertama. Tetapi yang menarik di antara ketetapan di dalamnya tidak ada yang menyebut tentang bentuk pemerintahan, struktur kekuasaan, dan perangkat-perangkat pemerintahan sebagai lazimnya suatu konstitusi, namun para pakar sejarah menyebutnya sebagai suatu konstitusi.<sup>26</sup> Para ahli dalam menilai dan berpendapat tentang naskah penting yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad itu tidak sama. Tetapi di dalam suatu hal pendapat mereka bersamaan, ialah naskah itu adalah suatu dokumen politik yang paling lengkap dan paling tua umurnya di dalam sejarah.<sup>27</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam piagam itu dirumuskan prinsip-prinsip dan dasar-dasar tata kehidupan bermasyarakat, kelompok-kelompok sosial Madinah, jaminan hak, dan ketetapan kewajiban.<sup>28</sup> Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah persamaan, kebebasan beragama, tolong-menolong dan membela yang teraniaya, musyawarah, persamaan hak dan kewajiban, hidup bertetangga, pertahanan

<sup>25</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 5.

<sup>26</sup> Ibid., 8.

<sup>27</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 51.

<sup>28</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan*, 5.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dan perdamaian, amar ma'ruf dan nahi munkar, ketakwaan dan kepemimpinan yang terangkum dalam butir-butir piagam yang terdiri dari 47 pasal.<sup>29</sup>

Sebagai kepala negara, Nabi telah melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu beliau membuat undang-undang dalam bentuk tertulis, mempersatukan penduduk Madinah untuk mencegah konflik-konflik diantara mereka agar terjamin ketertiban intern, menjamin kebebasan bagi semua golongan, mengatur militer, dan memimpin peperangan, melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum, mengirm surat-surat kepada para penguasa Jazirah Arab, mengadakan perjanjian damai dengan tetangga agar terjamin keamanan ekstern, mengelola pajak dan zakat serta larangan riba di bidang ekonomi dan perdagangan untuk menjembatani jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin, membudayakan musyawarah, menjadi *hakam* (arbiter) dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan, dan menunjuk para sahabat untuk menjadi hakim di daerah-daerah luar Madinah serta mendelegasikan tugas-tugas kepada para sahabat.<sup>30</sup>

Dalam Piagam Madinah Nabi menetapkan agar orang-orang mukmin bersatu dan saling membela satu sama lain dalam menegakkan Islam bila ada orang lain yang merintangi seorang mukmin yang berjuang di jalan Allah. Ketetapan itu bisa dikaitkan dengan latar belakang pengalaman Nabi dan

---

<sup>29</sup> Ibid., 9.

<sup>30</sup> Ibid., 76.

pengikutnya sebelum perang Badar yang selalu mendapat perlawanan keras dari orang-orang musyrik.<sup>31</sup>

Jika ditelusuri, kemunculan Piagam Madinah, bukanlah hasil pemikiran manusia belaka, melainkan terinspirasi dari pesan-pesan al-Qur'an. Misalkan tentang musyawarah yang terdapat dalam surat Ali Imran: 159, ketaatan terhadap pemimpin yang terdapat pada surat al-Nisaa: 59, dan sebagainya. Maka wajar jika salah satu butir Piagam menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam menentukan hukum adalah Allah dan Rasulnya.

Abdul Husein Sya'ban dalam *Fiqh al-Tasamuh fi al-Fikr al-'Arabi al-Islami: al-Tsaqafah wa al-Daulah*, menegaskan bahwa Piagam Madinah puncak dari toleransi dalam Islam. Piagam tersebut disebut puncak toleransi bukan hanya sekedar berupa naskah perjanjian, tetapi karena sudah diterjemahkan dalam dokumen politik, terutama melalui sebuah konstitusi Madinah. Bahkan, menurut Husein Sya'ban, sikap yang diambil Nabi merupakan kelanjutan kesepakatan perdamaian yang sudah dilaksanakan di Mekah, yang dikenal dengan *Hilf al-Fudhul*. Kesepakatan itu dikeluarkan pada abad ke-6 M, atau sekitar tahun 590-an, yang berisi perihal pentingnya menolak berbagai macam bentuk penindasan dan kezaliman, menegakkan persamaan bagi orang-orang Mekah dan mereka yang datang ke kota suci, menegakkan kebenaran dan membela hak-hak orang yang dizalimi, menjaga

---

<sup>31</sup> Ibid., 88.

hak hidup setiap orang dan menjadikan lembaga elit Mekah sebagai rujukan untuk mengatasi kezaliman. Dapat dipahami, bahwa Piagam Madinah pada hakikatnya merupakan sebuah kelanjutan dari kesepakatan yang dibuat pada masa Mekah, yang mana kesepakatan tersebut mengalami kemandegan, karena orang-orang Quraisy yang merupakan kelompok mayoritas kerap kali melanggar kesepakatan tersebut.<sup>32</sup>

Semasa hidupnya Nabi Muhammad kerap kali melakukan perjanjian dan kesepakatan serupa. Hal tersebut dilakukan untuk membangun kesepahaman diantara berbagai individu dan kelompok. Di samping itu, dalam rangka membangun pentingnya kesadaran kolektif dalam membangun sebuah tatanan masyarakat. Semakin besar tanggung jawab kolektif dari setiap individu yang berada dalam sebuah masyarakat, maka hal tersebut akan memberikan makna yang sangat berarti untuk mewujudkan cita-cita dalam membangun masyarakat yang maju dan berperadaban.

Melihat dari isi Piagam Madinah, dapat diketahui, bahwa Nabi Muhammad dalam kebijakan beliau yang besar menunjukkan semangat demokrasi yang luar biasa jauh dari kecenderungan otoriter, Rasulullah menyusun perjanjian tersebut berdasarkan prinsip-prinsip kontrak sosial, berdasarkan persetujuan dari semua orang yang akan terpengaruh oleh

---

<sup>32</sup> Zuhairi Misrawi, *MADINAH: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), 295-296.

pelaksanaannya itu sendiri. Piagam Madinah juga mampu mengubah eksistensi orang-orang mukmin dan masyarakat lainnya dari sekedar kumpulan manusia menjadi masyarakat politik, yaitu suatu masyarakat yang memiliki kedaulatan dan otoritas politik di wilayah Madinah sebagai tempat mereka hidup bersama, bekerja sama dalam kebaikan atas dasar kesadaran sosial mereka, yang bebas dari pengaruh dan penguasaan masyarakat lain dan mampu mewujudkan kehendak mereka sendiri, tetapi tetap berdasarkan al-Qur'an.

Secara keseluruhan, apa yang dituangkan di Piagam Madinah adalah penjabaran prinsip-prinsip kemasyarakatan yang diajarkan al-Qur'an, sekalipun pada waktu itu wahyu belum rampung diturunkan. Dengan kata lain, Piagam Madinah adalah pembedaan ajaran al-Qur'an dalam bidang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id sosio-kultural dan sosio-politik. Tujuan ideal yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu tata sosio-politik yang ditegakkan di atas landasan moral iman, tetapi dengan menjamin hak kebebasan setiap golongan untuk mengembangkan pola-pola budaya yang mereka pilih sesuai dengan keyakinan mereka.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ahmad Syafi'i ma'arif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu (Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 151.



## 2. Konstitusi Negara Islam Menurut Al-Mawardi

Nama lengkap ilmuwan Islam ini adalah Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bashri, ia lahir di Basrah pada tahun 370 H dan meninggal pada tahun 450 H. Dia seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi'i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Setelah berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain sebagai hakim, akhirnya dia kembali dan menetap di Baghdad, dan mendapat kedudukan yang terhormat pada pemerintahan Khalifah Qadir.<sup>34</sup> Al Mawardi termasuk penulis yang produktif. Cukup banyak karya tulisnya dalam berbagai cabang ilmu, dari ilmu bahasa sampai sastra, tafsir, fiqh dan ketatanegaraan.

Sebuah negara Islam, menurutnya, dinilai baik apabila memenuhi

beberapa persyaratan sebagai berikut: (1) keyakinan agama berfungsi sebagai kekuatan moral yang mampu mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia; (2) penguasanya kharismatik, berwibawa, dan dapat diteladani; (3) keadilan merata; (4) keamanan kuat dan terjamin; dan (5) kesuburan tanahnya dapat menjamin kebutuhan pangan warga negara. Dalam rangka terwujudnya negara ideal seperti itulah al Mawardi menyusun karya monumental, yang mengambil bentuk “konstitusi umum” bagi sebuah negara.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 58.

<sup>35</sup> Nina M. Armando (et al.), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 3.

Buku yang terkenal itu adalah *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, buku tersebut sudah berkali-kali dicetak di Mesir dan telah disalin ke dalam banyak bahasa. Buku ini sedemikian lengkap dan dapat dikatakan sebagai “konstitusi umum” untuk negara, berisikan pokok-pokok kenegaraan seperti tentang jabatan khalifah dan syarat-syarat bagi mereka yang dapat diangkat sebagai pemimpin atau kepala negara dan para pembantunya, baik di pemerintah pusat, maupun di daerah.<sup>36</sup> Dalam teorinya, al Mawardi menekankan pada pentingnya kepemimpinan umat (imamah), posisi khalifah sebagai imam, serta kewajiban dan fungsi imam. Sentralitas imam dalam pemerintahan menjadi perhatian utama, bukan pada bagaimana proses pembentukan negara berlangsung dan bagaimana peran atau sumbangan Islam dalam proses tersebut.<sup>37</sup>

Al Mawardi memandang Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang masih sentral dan penting dalam negara. Hal ini tampak dalam pendahuluan kitabnya *al Ahkam al Sultaniyah*, “Sesungguhnya imam (khalifah) itu di proyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.”<sup>38</sup> Pernyataan ini mengandung arti bahwa seorang imam adalah pimpinan agama di satu pihak dan pemimpin politik di pihak lain. Sifat kepemimpinan ini pula yang tampak dalam diri Nabi Muhammad SAW. Ia menjadi Rasul Allah di satu pihak dan sebagai

---

<sup>36</sup> Ibid., 59.

<sup>37</sup> Abdul Aziz, *Chieftom Madinah: Salah Paham Negara Madinah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), 16.

<sup>38</sup> Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 1.

pemimpin negara di pihak lain. Demikia juga dengan para Khulafaurrasyidin mereka memegang kekuasaan kepemimpinan agama dan kepemimpinan politik sekaligus.

Kata *imam* sendiri merupakan turunan dari kata *amma amma* yang berarti “menjadi ikutan”. Kata *imam* berarti “pemimpin atau contoh yang harus diikuti”, atau “mendahului, memimpin.” Orang yang menjadi pemimpin harus selalu di depan untuk diteladani sebagai contoh dan ikutan. Kedudukan imam sama dengan khalifah, yaitu pengganti Rasul sebagai pemelihara agama dan penanggung jawab urusan umat.<sup>39</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial sekaigus makhluk politik yang selalu membutuhkan kehadiran manusia lainnya dalam mencapai kesejahteraan hidupnya. Mereka hidup berkelompok dan membentuk masyarakat. Dan agar terjalin keharmonisan hubungan di antara mereka, maka harus dibuat suatu peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota kelompok, dan mereka harus memilih pemimpin untuk mengatur dan melaksanakan peraturan tersebut.

Jika imamah (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut syari’at, maka status wajibnya imamah (kepemimpinan) adalah *fardhu kifayah* seperti jihat, dan mencari ilmu. Artinya jika imamah

---

<sup>39</sup> J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raia Grafindo Persada, 1997), 59.

(kepemimpinan) telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka imamah (kepemimpinan) telah gugur dari orang lain.<sup>40</sup>

Menurut al Mawardi, untuk pemilihan atau seleksi diperlukan dua hal. *Pertama, Ahl al-Ikhtiar* atau mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi umat. Mereka harus memenuhi tiga syarat:

- 1) Memiliki sikap adil.
- 2) Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi imam.
- 3) Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam, dan paling mampu mengelola kepentingan umat di antara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu.<sup>41</sup>

*Kedua, Ahl al-Imamah*, atau mereka yang berhak mengisi jabatan imam. Mereka harus memiliki tujuh syarat:

- 1) Sikap adil dengan segala persyaratannya.
- 2) Ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.

---

<sup>40</sup> Ibid., 2.

<sup>41</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 63.

- 3) Sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) agar ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
- 4) Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
- 5) Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum.
- 6) Keberanian yang memadai yang membuatnya mampu melindungi rakyat, dan melawan musuh.
- 7) Keturunan Quraisy.<sup>42</sup>

Jabatan imamah (kepemimpinan) dapat dianggap sah dengan dua cara yaitu, *pertama*, pemilihan oleh *ahlu al-aqdi wa al-hal* (mereka yang berwenang mengikat dan melepaskan) yakni para ulama, cendekiawan dan pemuka masyarakat. *Kedua*, penunjukan oleh imam sebelumnya.<sup>43</sup> Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaan *ahlu al-aqdi wa al-hal* sehingga pengangkatan imam oleh mereka dianggap sah.

***Pertama***, sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan imam tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota *ahlu al-aqdi wa al-hal* dari setiap daerah, agar imam yang mereka angkat diterima oleh seluruh lapisan dan mereka semua tunduk kepada imamah (kepemimpinannya). ***Kedua***,

---

<sup>42</sup> Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyah*, 3-4.

<sup>43</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 64.

kelompok *fuqaha'* dan para teolog di Basrah berpendapat, bahwa minimal lembaga yang memilih imam yaitu *ahlu al-aqdi wa al-hal* beranggotakan lima orang, dan salah satu dari mereka diangkat menjadi imam dengan persetujuan empat orang lainnya. Dasar pendirian kelompok ini adalah dahulu Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama melalui pemilihan oleh lima orang, dan Umar bin Khattab telah membentuk “dewan formatur” yang terdiri dari enam orang untuk memilih seorang diantara mereka sebagai khalifah penggantinya dengan persetujuan lima anggota yang lain.<sup>44</sup>

**Ketiga**, kelompok ulama Kufah berpendapat, bahwa *ahlu al-aqdi wa al-hal* dianggap sah dengan tiga orang. Salah seorang dari ketiganya ditunjuk sebagai imam (khalifah) dengan persetujuan dua anggota yang lain. Jadi salah seorang dari mereka menjadi imam, dan dua orang lainnya menjadi saksi sebagaimana akad nikah dianggap sah dengan dihadiri satu orang wali dan dua orang saksi. **Keempat**, kelompok lain berpendapat, bahwa *ahlu al-aqdi wa al-hal* dianggap sah sekalipun dilakukan oleh seorang saja. Alasan yang dikemukakan karena dahulu Ali bin Abu Thalib diangkat oleh Abbas, paman Nabi, ia berkata kepada Ali: “Ulurkan tanganmu, aku membaikatmu”, melihat apa yang dilakukan oleh Abbas, orang yang hadir serentak memberi baiat

---

<sup>44</sup> Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyah*, 5.

kepada Ali.<sup>45</sup> Dalam hal ini al Mawardi tidak menyebutkan posisinya, pendapat mana yang didukungnya.

Menurut al Mawardi, salah satu tugas penting dari anggota lembaga pemilih (*ahlu al-aqdi wa al-hal*) adalah mengadakan penelitian terdahulu terhadap calon kepala negara apakah ia telah memenuhi persyaratan. Jika ia bersedia menjadi imam, maka segera di baiat, dengan pembaiatan tersebut maka ia resmi menjadi imam (khalifah) yang sah, kemudian seluruh umat harus membaiatnya dan taat kepadanya. Namun jika ia menolak dijadikan imam, maka ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan imam, karena imamah adalah *akad* atas dasar kerelaan, dan tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya. Dan jika ada diantara pemilih yang tidak setuju kepada pemimpin terpilih, maka jabatan imamah diberikan kepada orang lain yang layak menerimanya.<sup>46</sup>

Pendapat al Mawardi di atas menunjukkan bahwa proses pengangkatan kepala negara merupakan persetujuan dari kedua belah pihak, merupakan hubungan kontrak sosial atau perjanjian antara yang memilih dan yang dipilih atas dasar suka rela. Konsekuensinya kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan hak secara timbal balik. Oleh karenanya maka imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas

---

<sup>45</sup> Ibid., 5-6.

<sup>46</sup> Ibid., 6.

penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya. Menurut al Mawardi ada sepuluh tugas yang harus dilakukan oleh imam, yaitu:

1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan *ijma'* generasi salaf. Jika muncul pembuat bid'ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan umat terlindungi dari usaha penyesatan.
2. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan di antara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, orang yang zalim tidak berlaku semena-mena, dan orang teraniaya tidak merasa lemah.
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan bepergian ketempat mana pun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
4. Menegakkan hukum pidana, agar perkara yang dilarang Allah tidak dilanggar dan hak setiap hamba-Nya tidak di rusak.
5. Melindungi negara dari serangan musuh, dengan cara membuat benteng pertahanan yang tangguh dan kuat.



6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia di dakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum Muslimin, agak hak Allah terealisasi yaitu kemenangan-Nya atas seluruh agama.
7. Mengambil *fai* (harta yang didapatkan kaum Muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syari'at secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksa.
8. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam *Baitul Mal* (kas negara) tanpa berlebih lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
9. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
10. Terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.<sup>47</sup>

Tugas-tugas tersebut tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain dengan alasan sibuk, istirahat atau ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia

---

<sup>47</sup> Ibid., 23-24

limpahkan kepada orang lain, sungguh ia berkhianat kepada umat, dan menipu penasihat.<sup>48</sup>

Apabila pemimpin telah melaksanakan dan menjamin hak-hak rakyatnya, berarti pula ia telah melaksanakan hak-hak Allah. Jadi pelaksanaan syari'at dan terwujudnya kemaslahatan rakyat menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Artinya kekuasaan politik adalah alat untuk melaksanakan seperangkat hukum yang disyari'atkan oleh Allah dan alat untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat.<sup>49</sup> Jika pemimpin telah memenuhi hak-hak rakyat dan telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada rakyat, maka ia mempunyai dua hak atas umat (rakyat). *Pertama*, rakyat taat kepadanya. *Kedua*, menolongnya selama ia tidak berubah. Dua hal yang mengubah kondite dirinya dan karena dua hal tersebut, ia harus mundur dari imamah (kepemimpinan).

1. Cacat dalam keadilannya.
2. Cacat tubuh.<sup>50</sup>

Adapun cacat dalam keadilannya adalah ia berbuat salah dan fasiq, keluar dari jalan yang benar, perbuatan dan keyakinannya bercampur dengan hal-hal tercela dan mungkar lantaran ia menuruti hawa nafsunya.

---

<sup>48</sup> Ibid., 25

<sup>49</sup> J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 262.

<sup>50</sup> Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyah*, 26.

Adapun yang dimaksud dengan cacat tubuh adalah sesuatu yang menimpa fisiknya dan membuatnya tidak mampu lagi menjalankan roda pemerintahan, yaitu:

1. Kehilangan panca indra.

Kehilangan panca indra yang dimaksud adalah hilangnya ingatan dan hilangnya penglihatan, yang menghalangi seseorang untuk bisa diangkat menjadi imamah (pemimpin).

2. Kehilangan organ-organ tubuh lainnya.

Hilangnya organ tubuh yang menghalangi seseorang untuk menjadi imam adalah hilangnya organ tubuh yang menyebabkan seseorang hanya mampu mengerjakan sebagian pekerjaan, seperti hilangnya salah satu tangan atau salah satu kaki. Dalam kondisi seperti itu, ia tidak sah diangkat menjadi pemimpin, karena ia tidak mampu bertindak dengan sempurna.<sup>51</sup>

3. Kehilangan kebebasan untuk bertindak karena menjadi “tawanan” pembantu-pembantunya atau menjadi tawanan musuh.<sup>52</sup>

Jika kepala negara yang fasik kemabli bersikap adil, maka ia tidak boleh melaksanakan jabatannya kecuali dengan kontrak sosial yang baru.

---

<sup>51</sup> Ibid., 31.

<sup>52</sup> Ibid., 33.

Artinya kepala negara yang fasik harus disingkirkan dan tidak lagi sah menduduki jabatan itu.<sup>53</sup> Jika kepala negara berada dalam tawanan, maka seluruh umat wajib membebaskannya, karena diantara hak imam adalah mendapatkan pertolongan. Ia tetap menjadi imam selagi masih ada harapan ia bisa dibebaskan, dan ada jaminan ia bisa dilepaskan, dengan perang atau tebusan. Tetapi jika upaya pembebasan menemui jalan buntu maka ia harus dicopot dari jabatannya, kemudian dewan pemilihan mengangkat orang lain sebagai imam baru bagi kaum muslimin.<sup>54</sup>

### 3. Konstitusi Negara Islam Kartosuwirjo

Kartosuwirjo sudah sejak tahun 20-an telah memperjuangkan ide sebuah negara Islam dan pengertian Kartosuwirjo atas sebuah negara Islam adalah sebuah negara yang benar-benar menjalankan syariat dan hukum Islam sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan sunah Nabi secara konsekuen dan menyeluruh. Seperti yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran: "Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara total menyeluruh, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syetan". (Qs. Al-Baqarah, 2:208). Maksud total menyeluruh (kaffah) itu ialah dalam seluruh lapangan dan sektor kehidupan masyarakat dan negara, umat Islam harus Islami atau berdasarkan Islam. Baik dari segi

---

<sup>53</sup> J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 263.

<sup>54</sup> Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyah*, 33-34.

Politik, ekonomi, kultural, pendidikan, kebudayaan dan lain lain, seluruhnya harus Islami atau berdasarkan Islam.

Kartosuwirjo menguraikan struktur politik negara Islam Indonesia dalam konstitusi *Qanun Asasi*, yang dirancang pada tahun 1948. *Qanun Asasi* tersebut diawali oleh sebuah penjelasan singkat yang terdiri atas 10 pokok, antara lain disebutkan bahwa Negara Islam Indonesia tumbuh di masa perang, di tengah-tengah revolusi Nasional dan selama perang suci berjalan terus, Negara Islam Indonesia merupakan Negara Islam di masa perang atau "*Darul Islam fi Waqtil Harbi*". Hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah hukum Islam di masa perang. Perjuangan kemerdekaan yang telah berlangsung dinyatakan sudah kandas, dan umat Islam Indonesia akan meneruskan revolusi Indonesia dan telah mendirikan sebuah Negara Islam yang berdaulat, yaitu sebuah "Kerajaan Allah di dunia".<sup>55</sup>

Menurut pasal 1 konstitusi negara Islam Indonesia, negara yang diproklamkan Kartosuwirjo adalah sebuah republik (Jumhuriyah). Dalam republik ini negara menjamin berlakunya syari'at Islam dan akan memberi keleluasaan bagi pemeluk agama lain untuk melakukan ibadahnya. Dasar hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah hukum Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Qur'an dan Hadith Nabi. Instansi tertinggi negara itu adalah Majelis Syuro, tetapi dalam keadaan genting hak tersebut

---

<sup>55</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 112.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dapat dialihkan kepada Imam dan Dewan Imamah. Berdasarkan konstitusi ini, semua kekuasaan terpusat di tangan Imam yang harus orang Indonesia asli dan beragama Islam. Sesuai dengan itu semua kedudukan tinggi lainnya hanya boleh diduduki oleh orang Islam.<sup>56</sup> Berhubung tidak ada Parlemen, semua peraturan Negara Islam Indonesia dikeluarkan oleh Komandemen Tertinggi, yaitu Dewan Imamah yang dulu, dalam bentuk maklumat yang ditandatangani oleh Imam.

Dari konstitusi tersebut dapat disimpulkan, bahwa Kartosuwirjo mendirikan Negara Islam Indonesia mengikuti Negara Islam pertama yaitu Negara Madinah yang di pimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut dapat dilihat dari *Qanun Asasi* yang telah di bentuk oleh Kartosuwirjo.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>56</sup> Ibid., 112.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB IV

# PERAN KARTOSUWIRJO DALAM MENDIRIKAN NEGARA ISLAM INDONESIA (1949-1962)

## A. Perjuangan Kartosuwirjo Dalam Mempertahankan Kemerdekaan

### Indonesia

Ketika situasi perang Asia Pasifik mulai memburuk bagi pihak Jepang, mereka (Jepang) bersedia untuk memberi kepemilikan yang lebih besar bagi rakyat Indonesia untuk usaha-usaha perjuangannya. Orang Indonesia kini diperkenankan membentuk organisasi bersenjata sendiri. Pertama, pada bulan Oktober 1943, terbentuknya PETA (Pembela Tanah Air) dan kemudian, pada akhir 1944 dibentuklah *Hizbullah* (Tentara Allah), dari Masyumi. Kedua, pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang-Koiso menjanjikan Indonesia “merdeka di kelak kemudian hari”. Dan pada 1 Maret 1945 janji ini diulang, kali ini oleh panglima tertinggi Jepang, yang sekaligus mengumumkan pembentukan “Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan.” Berkat dibukanya kran kebebasan berupa konsesi dari pemerintah Jepang. Pada bulan Februari 1945, berkumpul sukarelawan *Hizbullah* di tempat pendidikan mereka untuk mendapatkan pendidikan dasar militer selama tiga bulan, setelah itu mereka ditugaskan untuk kembali ke tempat masing-masing guna mengajarkan ilmunya kepada anggota yang baru. Hal inilah yang sejak lama ditunggu oleh Kartosuwirjo, bahwa rakyat Indonesia sangat berhak untuk menentukan nasib bangsanya sendiri.

Dia segera mengaktifkan kembali perguruan *Suffah* yang ada di Malangbong untuk melatih para pemuda berupa latihan kemiliteran.<sup>1</sup>

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat, dan dengan demikian menghadapkan para pemimpin Indonesia pada suatu masalah yang berat. Soekarno masih juga percaya dengan serangkaian kompromi politik ketimbang mendekatkan dirinya padan rakyat. Hanya Kartosuwirjo sajalah yang mensosialisasikan tentang konsep Indonesia merdeka secara Islam dikalangan nasionalis Islam di tengah-tengah kekosongan politik dan kekuasaan. Sebenarnya, sebelum hari-hari menjelang proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1946, Kartosuwirjo telah lebih dulu menebar aroma deklarasi kemerdekaan Islam. Kartosuwirjo mula-mula memproklamasikan Negara Islam pada 14 Agustus 1945, tetapi kemudian memberikan dukungannya kepada Republik yang diproklamasikan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta.<sup>2</sup> Hal itu dilakukan oleh Kartosuwirjo untuk menunggu saat yang paling tepat untuk menghimpun dukungan besar bagi perjuangannya untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Kartosuwirjo mempergunakan kebanyakan waktunya untuk kegiatan-kegiatan kemiliteran setempat dan keterlibatan dalam politik partai Islam.

---

<sup>1</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo (Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/DI-TII semasa Orde Lama dan Orde Baru)*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), 57.

<sup>2</sup> Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan, (Kasus Darul Islam Jawa Barat)*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), 18.



Awal bulan Oktober 1945 Kartosuwirjo turut dalam pembicaraan antara anggota-anggota Masyumi di Surabaya, tentang rencana untuk mengubah Masyumi menjadi sebuah partai politik. Yang hadir pada pembicaraan ini selain Kartosuwirjo juga Wahid Hasyim dan Moh. Natsir. Ketika tidak dapat dicapai kata sepakat tentang nama yang baru untuk partai itu, maka partai Masyumi didirikan sebagai sebuah partai politik yang baru pada tanggal 7-11-1945 di Yogyakarta dengan nama yang lama.<sup>3</sup> Masyumi yang baru ini dimaksudkan agar menjadi partai politik kesatuan bagi semua Muslim, tanpa membedakan latar belakang agama, sosial, pendidikan dan ekonomi.<sup>4</sup>

Partai politik Islam baru tersebut yang diketuai oleh Hasyim Asy'ari mengadakan kongres pertama kali di Yogyakarta, pada kongres tersebut ditetapkan bahwa di samping *Hizbullah*, yaitu sebuah laskar Islam yang masih tetap berdiri, dibentuk lagi sebuah laskar yang dinamakan *Sabilillah*. Berbeda dengan *Hizbullah* yang anggotanya masih sangat muda, anggota *Sabilillah* terdiri dari generasi yang lebih tua. Keputusan lainnya adalah, bahwa umat Islam harus dipersiapkan untuk menjalankan jihad. Dalam programnya, Masyumi merumuskan tujuannya, yaitu untuk menciptakan sebuah negara hukum berdasarkan ajaran agama Islam.<sup>5</sup> Kemudian anggota Masyumi mendirikan kantor-kantor cabang partai tersebut mulai dari tingkat provinsi hingga ke bawah yaitu tingkat desa. Karena itu Kartosuwirjo

---

<sup>3</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 54.

<sup>4</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam*, 72.

<sup>5</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 55.

mengadakan perjalanan ke Jawa Barat untuk mempersiapkan pendirian kantor pusat Masyumi di daerah Priangan. Kantor pusat ini mula-mula dipimpin oleh K. Zainuddin tetapi pada akhir tahun itu badan pengurus dibubarkan.

Pada bulan juni 1946, Masyumi daerah Priangan mengadakan konferensi di kota Garut, untuk memilih pengurus yang baru. Dalam konferensi tersebut Kartosuwirjo menunjuk K. H. Muchtar sebagai ketua umum dan dia sendiri menjadi wakil ketua. Sanusi Partawijaya menjadi sekretaris badan pengurus, Isa Anshari dan K. H. Toha memimpin bidang ekonomi, Kamran sebagai pemimpin *Sabilillah*. Dalam konferensi tersebut Kartosuwirjo menyampaikan pidato tentang haluan politik Islam yang berisi pertanyaan mengenai siapa yang akan berkuasa di Indonesia. Dengan memahamkan dirinya kepada ajaran Islam yang *hanif*, Kartosuwirjo menganjurkan persatuan dalam cita-cita perjuangan. Ia memperingatkan para pendengarnya yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id sekaligus merupakan pendukungnya, bahwa konflik antara sesama bangsa Indonesia hanyalah akan menguntungkan Belanda, dan ia mendesak menghentikan perbedaan-perbedaan ideologi. Segera setelah tercapai kemerdekaan penuh, perbedaan-perbedaan ini dapat dicari penyelesaiannya secara demokratis, menurut kedaulatan rakyat.<sup>6</sup>

Sementara itu di *Institut Suffah* yang berada di Malangbong sampai saat itu laskar *Hizbullah* mendapatkan latihan kemiliteran dari Ateng Jaelani, seorang perwira PETA yang dahulu. Dengan perhitungan politiknya, Kartosuwirjo meramalkan akan

---

<sup>6</sup> Al- Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 66.

terjadi perjuangan bersenjata. Karena itu Kartosuwirjo bolak-balik antara Yogyakarta dan Jawa Barat untuk meyakinkan masyarakat akan kemungkinan meletusnya perang.

Tidak lama setelah PETA, *Heiho*, dan *Seinendan* dan kesatuan Indonesia yang lainnya dilucuti dan dibubarkan oleh Jepang, pemimpin-pemimpin organisasi tersebut selain mendirikan BKR (Badan Keamanan Rakyat) juga mendirikan berbagai laskar atau Badan Perjuangan dengan bermacam-macam ikatan etnis, politik dan keagamaan. Dengan demikian, di daerah Bandung dan Priangan saja terbentuk 18 laskar besar. Tetapi terdapat masalah yang dihadapi oleh laskar-laskar itu adalah kurangnya pengadaan senjata, karena di daerah Bandung, rakyat kurang berhasil dalam merampas senjata dari tentara Jepang. Untuk mencapai koordinasi yang lebih baik dari laskar-laskar tersebut, maka pada tanggal 15 September 1946 di dirikan di Bandung Markas Daerah Pertahanan Priangan (MDPP). Dengan anggotanya para *Hizbullah* di bawah pimpinan Zainal Abidin, Kadar Solihat, dan Kamran, juga laskar *Sabilillah* di bawah pimpinan politikus Masyumi diantaranya Isa Anshari, Ajengan Toha, Kiai Jusuf Taujiri, yang dulu bersama-sama dengan Kartosuwirjo mendirikan KPK-PSII.<sup>7</sup>

Pada bulan Februari dan Maret 1947 di Malang, Kartosuwirjo ditunjuk sebagai salah seorang dari lima anggota Masyumi dalam komite eksekutif, yang terdiri dari 47 anggota untuk mengikuti sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Dalam sidang tersebut dibahas apakah persetujuan Linggarjati yang telah

---

<sup>7</sup> Ibid., 67.

ditandatangani oleh pemerintah Republik dan Belanda pada bulan Nopember 1946 akan disetujui atau tidak. Kepergian Kartosuwirjo disertai para pejuang *Hizbullah* Jawa Barat, karena dalam rapat tersebut kemungkinan ada dua kubu yang bertarung antara laskar sayap kiri (diwakili partai Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia)), yang menginginkan disetujui hasil perundingan tersebut dengan laskar *Hizbullah* (diwakili partai Masyumi dan PNI), yang hampir semua wakilnya tidak menyetujui hasil perundingan.<sup>8</sup> Kartosuwirjo merupakan anggota Masyumi yang menolak perjanjian Linggarjati tersebut tanpa kompromi. Karena, nampak jelas bahwa dengan di setujuinya perjanjian Linggarjati maka akan sangat menguntungkan pihak Belanda dalam usahanya untuk menjajah kembali Indonesia. Ketika anggota KNIP yang menolak perjanjian Linggarjati diancam oleh partai Perindo, Sutomo (Bung Tomo) meminta kepada Kartosuwirjo untuk mencegah pasukannya agar tidak menembaki satuan-satuan Pesindo.<sup>9</sup> Pada tahun 1947 perjuangan politik umat Islam benar-benar ditekan, karena kekuatan militer secara keseluruhan berada di tangan kelompok sayap kiri, yaitu PKI dan kaum Sosialis.<sup>10</sup>

Hal tersebut di atas terbukti ketika Amir Syarifudin menjabat sebagai menteri pertahanan dan dia mengharuskan setiap laki-laki yang berusia 15 tahun ke atas untuk masuk ke dalam Inspektorat Perjuangan yang di koordinir kubu komunis, namun usaha yang dilakukan oleh Amir Syarifudin ditentang oleh R. Oni selaku ketua

---

<sup>8</sup> Ibid., 67.

<sup>9</sup> Adhe Firmansyah, *S. M. Kartosuwirjo*, 39.

<sup>10</sup> Holik H. Dengel, *Darul Islam*, 59.

*Sabilillah* di daerah Priangan yang dilantik pada bulan April 1947, ia menilai bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh Amir Syarifudin tersebut mempunyai tujuan untuk membuat umat Islam menjadi Sosialis.<sup>11</sup> Dan alasan lain bahwa semua tentara Republik adalah anggota sayap kiri. Maka kemungkinan *Sabilillah* dan *Hizbullah* diterima masuk TNI sangat tipis, dan di khawatirkan bahwa, TNI hanya akan mengambil senjatanya saja dari kedua laskar tersebut, selanjutnya mereka segera dipulangkan ketempat masing-masing.<sup>12</sup>

Sekitar bulan Mei 1947, pihak Belanda sudah memutuskan bahwa mereka harus menyerang Republik secara langsung. Biaya pemeliharaan suatu pasukan bersenjata sekitar 100.000 serdadu di Jawa, yang sebagian besar tidak aktif, merupakan pemborosan keuangan yang serius yang tidak mungkin dipikul oleh perekonomian negeri Belanda yang hancur karena perang. Apabila mereka ingin mempertahankan pasukan ini, maka pihak Belanda memerlukan komoditas dari Jawa (khususnya gula) dan Sumatera (khususnya minyak dan karet). Kalangan militer Belanda merasa yakin bahwa kota-kota yang dikuasai pihak Republik dapat ditaklukkan dalam waktu dua minggu dan seluruh wilayah Republik dalam waktu enam bulan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid., 59.

<sup>12</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 67.

<sup>13</sup> M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), 473.

Pada tanggal 21 Juni 1947, Belanda melanggar perjanjian Linggarjati<sup>14</sup> yang mengakui Republik sebagai penguasa *de facto* di Jawa, Madura dan Sumatera. Belanda memang tidak akan pernah berniat untuk memenuhi perjanjian itu, mereka hanya ingin membodohi pemerintah Republik agar Belanda bisa mengulur waktu guna untuk memperkuat pasukannya untuk menyerang Indonesia kembali.

Melihat aksi Belanda yang tidak mematuhi perjanjian Linggarjati membuat Syahrir dengan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri pada Juli 1947, karena sebelumnya dia sangat menyetujui perjanjian tersebut. Setelah Agresi Militer I pada bulan Juli, Amir Syarifudin menggantikan kedudukan Syahrir sebagai perdana menteri yang sebelumnya ia menjabat sebagai menteri pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri, dia menggaet anggota PSII untuk duduk dalam kabinetnya, termasuk menawarkannya kepada Kartosuwirjo untuk turut digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id serta duduk dalam kabinetnya menjadi wakil menteri pertahanan kedua. Dan jawaban Kartosuwirjo seperti yang dijelaskan dalam sepucuk suratnya kepada Soekarno dan Amir Syarifudin, dia menolak kursi menteri karena “ia belum terlibat dalam PSII dan masih merasa terikat kepada Masyumi”.<sup>15</sup>

Kartosuwirjo menolak tawaran itu bukan semata-mata loyalitasnya kepada Masyumi. Penolakan itu juga ditimbulkan oleh keinginannya untuk menarik diri dari gelanggang politik pusat yang sudah keruh karena semakin menjadi-jadinya

---

<sup>14</sup> Adhe Firmansyah, *S. M. Kartosuwirjo*, 39.

<sup>15</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 68.

petualangan para politikus komunis, dan ketidak mampuan Soekarno dalam mengatasi setiap masalah yang ditimbulkan Belanda. Akibat menyaksikan kondisi politik yang tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia yang disebabkan berbagai perjanjian yang diadakan antara pemerintah RI dengan Belanda, disamping itu Kartosuwirjo tidak menyukai arah politik Amir Syarifudin yang sangat ke kiri-kirian. Hal itu terlihat jelas dari sepak terjang Amir Syarifudin selama manggung di percaturan politik nasional dengan menjadi perdana menteri merangkap menteri pertahanan.<sup>16</sup>

Kecewa akibat politik Masyumi dewasa itu Kartosuwirjo pun kembali ke Malangbong. Dia tetap menjabat sebagai sekretaris pertama partai, tetapi sekarang dia diangkat pula sebagai wakilnya untuk Jawa Barat. Dalam jabatannya yang terakhir ini dia mulai menyusun kembali pasukan gerilya Islam di daerah ini. Pada tahun 1947 ia digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mendirikan Dewan Pertahanan Umat Islam di Garut dan Majelis Umat Islam Indonesia di Tasikmalaya atas nama Masyumi. Kedua organisasi ini direncanakan untuk memperdalam dan mengkoordinasikan perjuangan masyarakat Islam setempat untuk melawan Belanda.<sup>17</sup>

Pada tanggal 20 juli 1947 tengah malam, pihak Belanda melancarkan “aksi polisional” mereka yang pertama. Pasukan-pasukan bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten), serta dari Surabaya

---

<sup>16</sup> Ibid., 68.

<sup>17</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam*, 74-75.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai semua pelabuhan di Jawa. Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi instalasi minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang diamankan. Pasukan-pasukan Republik bergerak mundur dalam kebingungan dan menghancurkan apa saja yang dapat mereka hancurkan. Melihat keberhasilan dalam aksi ini, beberapa orang Belanda, termasuk Van Mook ingin melanjutkan aksinya merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak, tetapi pihak Amerika dan Inggris yang tidak menyukai “aksi polisional” tersebut serta menggiring Belanda untuk segera menghentikan penaklukan sepenuhnya terhadap republik.<sup>18</sup> Pada tanggal 14 Agustus 1947 Kartosuwirjo mengumumkan jihad terhadap Belanda yang terus mendesak maju.<sup>19</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **B. Perjuangan Kartosuwirjo dalam Memproklamasikan Negara Islam**

### **Indonesia**

Pada tanggal 19 Januari 1948 atas prakarsa pihak sekutu diadakanlah suatu persetujuan bersama antara pemerintah Republik dengan Belanda di atas kapal Amerika *USS Renville* dipelabuhan Jakarta,<sup>20</sup> dengan penandatanganan persetujuan Renville oleh ketua delegasi masing-masing, yaitu Raden Abdulkadir Widjoatmodjo atas nama pemerintah kerajaan Belanda dan Mr. Syarifuddin atas

---

<sup>18</sup> M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia*, 473-474.

<sup>19</sup> Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional*, 19.

<sup>20</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 69.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



nama pemerintah Indonesia.<sup>21</sup> Salah satu isi perjanjian itu menyatakan bahwa TNI harus mengosongkan kantung-kantung gerilya yang tersebar di wilayah pendudukan Belanda. Pengosongan ini kemudian dikenal sebagai “hijrah”, istilah yang pernah dipakai PSII dan didukung oleh Kartosuwirjo. Namun, ia tidak mau melaksanakan “hijrah” fersi pemerintah RI tersebut. Karena menurutnya pemerintah RI dan TNI sebenarnya tidak “hijrah” melainkan “lari”.<sup>22</sup> Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Republik dengan menyetujui perjanjian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu mengadakan perundingan dalam mempertahankan makna kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh rakyat Indonesia.

Dengan hasil diadakannya perjanjian Renville menyebabkan jatuhnya Amir Syarifudin. Anggota-anggota TNI dan Masyumi dalam kabinetnya meletakkan jabatannya ketika persetujuan Renville ditandatangani, dan kemudian Amir Syarifudin meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri pada 23 Januari 1948. Dia mungkin mengharapkan tampilnya kabinet baru yang beraliran kiri untuk menggantikannya, tetapi Soekarno berpaling ke arah lain. Dia menunjuk Hatta untuk memimpin suatu “kabinet presidential” darurat (1948-1949), yang bukan bertanggung jawab kepada KNIP melainkan kepada Soekarno sebagai presiden. Para anggota kabinet Hatta rata-rata berasal dari golongan tengah, terutama terdiri atas orang-orang PNI, Masyumi, dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai. Amir dan sayap kiri kini

---

<sup>21</sup> Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional (dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan)* jilid II, (Yogyakarta: LKIS, 2008), 128.

<sup>22</sup> Adhe Firmansyah, *S. M. Kartosuwirjo*, 40.

menjadi pihak oposisi. Para pengikut Syahrir mempertegas perpecahan mereka dengan pengikut-pengikut Amir dengan jalan membentuk partai tersendiri, yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada bulan Februari 1948 dan memberikan dukungan mereka kepada pemerintahan Hatta.<sup>23</sup>

Pada bulan Februari 1948 koalisi sayap kiri di bawah pimpinan Amir Syarifuddin yang berada diluar pemerintahan Republik ini memulai suatu usaha baru dengan menimbulkan bencana untuk mendapatkan kembali kekuasaan. Dengan mengubah nama baru menjadi *Front Demokrasi Rakyat* (FDR) mencela persetujuan Renville yang sebetulnya dulu dirundingkan pada masa pemerintahannya. Front tersebut berusaha membentuk organisasi-organisasi petani dan buruh, tetapi usaha itu hanya meraih sedikit keberhasilan.<sup>24</sup> Sementara itu pihak Belanda terus bergerak maju untuk membentuk negara-negara federal di wilayah-wilayah yang telah digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id direbutnya. Belanda telah merebut semua pelabuhan penting di Jawa serta daerah-daerah sumber hasil bumi di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Situasi yang kacau pada saat itu membuat Kartosuwirjo lebih memfokuskan perjuangannya. Dalam suatu rapat Masyumi di Garut, yang dipimpin Kartosuwirjo sendiri dan di mana semua organisasi yang bergabung di Masyumi harus mengirimkan wakilnya, dalam rapat tersebut diputuskan, bahwa Masyumi cabang Garut diganti namanya menjadi *Dewan Pertahanan Oemat Islam* (DPOI). Anggaran dasar dan

---

<sup>23</sup> M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia*, 475.

<sup>24</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 70.

anggaran rumah tangga DPOI sama seperti anggaran dasar Masyumi, hanya ditambahkan sebuah pasal baru yang berhubungan dengan pertahanan melawan tentara Belanda. Sebelum pembentukan DPOI di Garut, juga sudah dibentuk dua *Madjlis Pertahanan Oemmat Islam* (MPOI) di Tasikmalaya dan di Ciamis. Untuk masalah pertahanan *Sabilillah* di bawah pimpinan R. Oni ditempatkan di bawah komando MPOI dan DPOI.<sup>25</sup>

Akibat persetujuan perjanjian Renville maka pasukan yang ada di daerah-daerah yang telah dikuasai oleh Belanda harus ditarik mundur ke Jawa Tengah. Dengan demikian sekitar 29000 tentara Divisi Siliwangi dipindahkan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Tetapi satuan gerilyawan *Hizbullah* dan *Sabilillah* menolak untuk mematuhiinya dan memilih untuk bertahan. Di antara satuan-satuan *Hizbullah* yang tetap tinggal, yaitu mereka yang dipimpin oleh Zainal Abidin di daerah digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Baluburlimbangan dan Ateng Kurnia yang beroperasi sekitar Cicalengka, serta di Cirebon di bawah pimpinan Agus Abdullah Sukunsari. Sedangkan satuan-satuan *Sabilillah* yang tetap tinggal berada di bawah pimpinan Enokh di daerah Wanaraja dan Garut, dan oleh Oni di sekitar gunung Cupu, sebelah utara Tasikmalaya, dan satu Batalyon lengkap untuk bergerilya di daerah Bandung Selatan, yaitu Batalyon 22 Jaya Pangrengot di bawah pimpinan Sugih Arto.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid., 71.

<sup>26</sup> Ibid., 71.

Pada tanggal 30 Januari 1948, R. Oni berangkat ke Peuteuyunggal dekat Garut untuk berunding dengan Kartosuwirjo tentang akibat dari perjanjian Renville. Saat itu Kartosuwirjo memakai nama “kalipaksi”. Keduanya sepakat bahwa pasukan Islam agar tetap tinggal di Jawa Barat untuk melanjutkan perjuangan bersama-sama dengan rakyat untuk melawan Belanda. Dampaknya Tentara Islam pecah, diizinkan Oleh Kartosuwirjo untuk memihak Tentara Nasional Indonesia,<sup>27</sup> tetapi pasukan yang mengundurkan diri atau yang memihak kepada Tentara Nasional Indonesia harus dilucuti senjatanya dengan damai atau dengan dipaksa. Keputusan penting lainnya adalah akan diadakan sebuah konferensi di Pangwedusan di dekat Cisayong pada 10 Februari dan harus dihadiri oleh semua pimpinan Islam daerah Priangan.<sup>28</sup>

Pada tanggal 10 Januari 1948 telah berkumpul 160 wakil-wakil organisasi Islam di Pangwedusan untuk mengadakan sebuah konferensi yang akan berlangsung digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dua hari. Di antara mereka hadir Kartosuwirjo sebagai wakil Pengurus Besar Masyumi untuk Jawa Barat, Kamran sebagai Komandan Territorial *Sabilillah*, Sanusi Partawijaya sebagai ketua Masyumi daerah Priangan, Dahlan Lukman sebagai ketua GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia), Siti Murtadji'ah sebagai ketua Putri GPII, dan Abdullah Ridwan sebagai ketua *Hizbullah* untuk Priangan. Sebagai ketua Masyumi cabang Garut hadir Saifullah yang beberapa waktu kemudian ditawan oleh pasukan Belanda, begitu juga 4 ketua DPOI yang lain. Dari Bandung dan Sumedang

---

<sup>27</sup> Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2 (Buku yang Akan Menuntaskan Kepenasaran Anda akan Kebenaran Sejarah Indonesia)*, (Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta, 2010), 188.

<sup>28</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 64.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

hadir juga masing-masing dua utusan dari cabang DPOI, selain itu hadir juga dari Tasikmalaya dan Ciamis 3 orang anggota MPOI.<sup>29</sup>

Keputusan penting yang diambil dalam konferensi Cisayong adalah membekukan Masyumi di Jawa Barat, membentuk pemerintah daerah dasar di Jawa Barat, dan mendirikan Tentara Islam Indonesia (TII). Dalam pemerintah dasar Jawa Barat yang diusulkan ini Majelis Islam atau kadang-kadang disebut juga Majelis Umat Islam, dan organisasi-organisasi Islam yang ada harus bergabung. Ini akan menggantikan kedua Majelis Islam yang telah ada, yang didirikan di Garut dan Tasikmalaya pada tahun sebelumnya. Ketua Majelis Islam ini adalah Kartosuwirjo yang juga bertanggung jawab dalam masalah pertahanan. Beberapa hari sesudah konferensi Cisayong, dilangsungkan suatu pertemuan lain dengan tujuan memberikan bentuk yang konkrit kepada Tentara Islam Indonesia. Tidak hanya dibentuk Tentara Islam Indonesia yang sebenarnya, tetapi juga sejumlah korps khusus seperti BARIS (Barisan Rakyat Islam) dan PADI (Pahlawan Darul Islam) juga diadakan. Markas besarnya didirikan di Gunung Cupu, pangkalan pasukan *Sabililah* yang dipimpin Oni.<sup>30</sup> Seminggu setelah konferensi terjadi pertempuran pertama dengan pihak Belanda, dan peristiwa ini disebut sebagai “Hari Angkatan Senjata”. Pertempuran dengan Belanda masih terus berlangsung hingga akhir April 1948. Ketika pasukan TII meninggalkan daerah kantong gerilya awal Mei dan memencar di daerah

---

<sup>29</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 72.

<sup>30</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam*, 77.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tasikmalaya, Ciamis, Garut dan Indihiang, dimana di daerah tersebut telah diduduki tentara Belanda, dan mulai diserang kembali oleh TII.

Pada tanggal 1-2 Maret berlangsung suatu konferensi penting yang kedua di Cipeundeuy, Banturujeg di daerah Cirebon yang dihadiri oleh semua pimpinan cabang-cabang Masyumi daerah Jawa Barat seperti dari Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, Cirebon, dan juga para komandan TII. Disini dikukuhkan keputusan-keputusan yang telah dicapai di Pangwedusan, sedangkan selanjutnya ditekankan perlunya bersiap menciptakan suatu Negara Islam. Hal ini dianggap perlu agar siap siaga sekiranya Belanda melanjutkan rencananya menciptakan Negara Pasundan yang merdeka di Jawa Barat, atau bila pemerintah republik harus bubar.<sup>31</sup> Sehingga pada pertemuan tersebut Kartosuwirjo diangkat menjadi Imam di Jawa Barat.

Kartosuwirjo beserta umat Islam tetap berharap untuk dapat merealisasikan cita-citanya untuk mendirikan Negara Islam secara legal, meskipun belum di proklamasikan secara terang-terangan, namun rencana itu tidak pernah lenyap dari umat Islam Jawa Barat untuk mempersiapkan kelahirannya. Struktur pemerintah yang disusun oleh Kartosuwirjo dan Oni, jelas dimaksudkan sebagai sebuah pemerintah Islam yang akan menggantikan pemerintah Republik Indonesia jika kalah dalam perang melawan Belanda.

Pada tanggal 1-5 Mei 1948 diselenggarakan konferensi yang ketiga di Cijoho. Hasil terpenting yang diputuskan dalam rapat tersebut adalah perubahan nama

---

<sup>31</sup> Ibid., 78.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Majelis Islam Pusat menjadi Majelis Imamah di bawah pimpinan Kartosuwirjo sebagai Imam. Majelis Imamah itu terdiri dari lima “kementerian” yang dipimpin oleh masing-masing ketua Majelis. Majelis tersebut adalah:

1. Majelis Penerangan yang dipimpin oleh Toha Arsyad
2. Majelis Keuangan yang dipimpin oleh Sanusi Partawijaya
3. Majelis Kehakiman yang dipimpin oleh K. H. Ghazali Thusi
4. Majelis Pertahanan yang dipimpin oleh S. M. Kartosuwirjo
5. Majelis Dalam Negeri yang dipimpin oleh Sanusi Partawijaya<sup>32</sup>

Anggota Majelis Imamah adalah Kamran sebagai komandan Divisi TII, Syarif Hidayat dan R. Oni sebagai Komandan Resimen Sunan Rachmat, di samping itu dibentuk pula Majelis Fatwa yang dipimpin oleh seorang Mufti Besar, dan anggota-anggotanya terdiri dari para mufti. Tugas majelis Fatwa ini sebagai penasehat Imam. Keputusan penting lainnya adalah mendirikan dan menguasai satu “Ibu Daerah Negara Islam”, yaitu suatu daerah dimana berlaku “kekuasaan dan hukum-hukum agama Islam”, yang mana daerah ini dinamakan Daerah I (D-I), daerah di luar Daerah I dibagi-bagi menjadi Daerah II (D-II) yaitu daerah dimana hanya sebagian saja yang dikuasai oleh umat Islam dan Daerah III (D-III) yaitu daerah yang masih dikuasai oleh pihak bukan Islam (Belanda).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Adhe Firmansyah, *S. M. Kartosuwirjo*, 57-58.

<sup>33</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 75.

Kartosuwirjo yakin bahwa perjanjian Renville akan dilanggar oleh Belanda. Keyakinan tersebut terbukti ketika pada 19 Desember 1948 terjadi Agresi Militer II. Ibukota Yogyakarta direbut Belanda, Soekarno dan Hatta ditangkap dan diasingkan, demikian juga beberapa anggota kabinet.<sup>34</sup> Melihat situasi tidak menentu ini, pada tanggal 20 Desember 1948 umat Islam bangsa Indonesia di bawah komando Kartosuwirjo mengumandangkan perang suci melawan Belanda.

Perang suci yang dikobarkan oleh Kartosuwirjo ini diilhami oleh firman Allah:

*"Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah kepada mereka. Tempat mereka ialah neraka jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya". (QS. At-Taubah: 73)*<sup>35</sup>

Dengan diilhami oleh ayat-ayat inilah, Tentara Islam Indonesia di bawah komando Kartosuwirjo menyerukan *jihad fi sabilillah* untuk memerangi Belanda dan

Negara Islam Indonesia dapat didirikan. Dengan komando sebagai berikut:

1. Diperintahkan kepada seloeroeh lapisan Oemmat Islam Bangsa Indoensia, oentoek moelai melakoekan perang Soetji Moethlak, Perang Totaliter itoe, hingga pendjadjahan hilang moesnah sama sekali. Dan
2. Diperintahkan kepada seloeroeh Angkatan Perang Negara Islam Indonesia, oentoek mempelopori dan membantoe ra'iat, hingga revolusi Islam selesai dan Nègara Islam Indonesia berdiri dengan sempoernanja, di seloeroeh Indonesia.<sup>36</sup>

Madinah, 19 Safar 1368  
20 Desember 1948

Pemerintah Negara Islam Indonesia

---

<sup>34</sup> Adhe Firmansyah, *S. M. Kartosuwirjo*, 41.

<sup>35</sup> Kholid O. Santoso, *Jejak-Jejak Sang Petualang*, 93.

<sup>36</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 83.



Imam:

S. M. kartosuwirjo

Dengan berakhirnya Republik di Yogyakarta, dan dengan dikibarkannya bendera putih di karesidenan Yogyakarta, sebenarnya telah terdapat fakum kekuasaan, yang oleh Kartosuwirjo dipandang sebagai saat yang tepat untuk memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Namun dia masih tetap mencoba untuk memperoleh pimpinan komando tertinggi secara legal. Dan Kartosuwirjo sendiri telah menyatakan bahwa perjuangannya adalah lanjutan dari proklamasi 17 Agustus 1945. Dan dia berharap agar Negara Islam Indonesia yang sudah dia bentuk akhirnya akan dilegalisir meskipun tanpa proklamasi.

Setelah perjanjian Renville dilanggar oleh pihak Belanda, Divisi Siliwangi yang telah mengungsi diperintahkan untuk kembali ke Jawa Barat yang di sebut digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dengan "*Long March*". "*Long March*" ini dianggap sebagai *hijrah* agar dipandang Islami semua tindakan mundur tentara Siliwangi ini. Padahal mereka bukan ber-*hijrah*, mereka sesungguhnya *kabur* dari Jawa Barat ke Yogyakarta. Mereka dianjurkan untuk bersama-sama bergabung dengan Tentara Islam Indonesia untuk mempertahankan daerah Jawa Barat dari ancaman militer Belanda dan negara bonekanya yaitu Negara Pasundan.

Semua usaha dari TII yang mencoba untuk mengarahkan ke arah kerja sama melawan Belanda mengalami kegagalan. Kepada kesatuan TNI diberitahukan bahwa mereka sebaiknya menempatkan diri di bawah komando Tentara Islam Indonesia.

Dan diberitahukan pula bahwa semenjak *kaburnya* mereka ke Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan perjanjian Renville, sesungguhnya yang memperjuangkan Jawa Barat adalah Tentara Islam Indonesia bersama-sama dengan rakyat Jawa Barat bahu membahu melaksanakan wajib sucinya mempertahankan bumi Indonesia dari kekerasan dan kedzaliman tentara Belanda. Karena kesatuan TNI tidak mau bergabung dengan TII maka terjadilah peristiwa yang dicatat sebagai awal dari pertikaian yang berlangsung pada tanggal 25 Januari 1949 di Antralina. Kejadian ini sekaligus merupakan awal dari permusuhan antara TII dengan TNI dan Belanda yang oleh Kartosuwirjo disebut dengan “Perang Segi Tiga Pertama di Indonesia”.<sup>37</sup>

Kartosuwirjo menyatakan dalam maklumatnya, bahwa kesatuan TNI yang kembali dari Jawa Barat, dan yang dia sebut sebagai “tentara liar” tidak pandai menghargai dirinya sebagai tamu, melainkan ingin menguasai daerah dan rakyat Negara Islam Indonesia. Menurut Kartosuwirjo, “Waktu mereka (ja’ni R.I dlorurot dan komunis gadungan) itu masuk di daerah de facto Majelis Islam, maka dengan sombong dan tjongkaknya mereka mengindjak-indjak hak dan memperkosa keadilan “tuan rumah”, sehingga terjadilah insiden pertama dengan menggunakan sendjata, yang terkenal dengan nama “Pertempuran Antralina”. Dia juga mewajibkan seluruh anggota TII, PADI, BKN dan organisasi *Negara Islam Indonesia* yang lainnya untuk

---

<sup>37</sup> Lihat S. M. Kartosuwirjo (Karma Yoga) dalam Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 84.

memperlakukan tentara liar, gerombolan serta golongan lain yang ada di Jawa Barat sesuai dengan hukum Islam di masa perang.<sup>38</sup>

Menurut Kartosuwirjo di Jawa Barat sejak didirikannya Negara Islam tahun 1948 hanya terdapat dua golongan yang saling mengadu kekuatan, yaitu Belanda dan Negara Islam Indonesia, semua golongan-golongan lainnya tidak diizinkan untuk menduduki sebuah daerah di Jawa Barat. Bila kesatuan-kesatuan tersebut memberikan perlawanan pada waktu mereka dilucuti, maka mereka dianggap sebagai musuh Negara Islam Indonesia dan musuh Islam.<sup>39</sup> Termasuk juga Divisi Siliwangi yang ia anggap telah menyerahkan Jawa Barat kepada Belanda. Oleh karena itu kesatuan ini tidak lagi punya hak untuk menduduki kembali daerah Jawa Barat.

Ketika tekanan internasional datang, terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda, akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan RI. Pada 7 Mei 1949, ditandatangani perjanjian *Roem-Royen*. Dalam perjanjian tersebut Belanda menjanjikan untuk mendirikan kembali Pemerintahan Republik Indonesia dan menghentikan semua permusuhan. Sebaliknya, pihak Indonesia harus dapat menghentikan semua aksi gerilyanya terutama aksi yang dilakukan oleh gerakan

---

<sup>38</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 87.

<sup>39</sup> *Salinan Pedoman Dharma Bhakti I...*, maklumat Militer No 1, lihat Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 87.

Darul Islam. Dan harus bersedia pula mengikuti Konferensi Meja Bundar untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.<sup>40</sup>

Kartosuwirjo yang memang tidak pernah setuju dengan perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah RI seperti kedua perjanjian sebelumnya, ia juga menolak hasil perjanjian *Roem Royen*. Kartosuwirjo yakin bahwa dengan menyerahkan kedaulatan dari tangan Belanda, Republik Indonesia Serikat menjadi sebuah Negara atas belas kasihan Belanda. Kartosuwirjo kini memisahkan diri dari Masyumi yang turut berpartisipasi dalam perundingan yang sedang berlangsung itu dan dia mencap sikap para politisi seperti Hatta dan Moh. Roem sangat memalukan: “Roem dan Hatta yang dewasa achir-achir ini memang sudah tidak tahu malu lagi, mendjual negara sampai habis, obral besar-besaran. Atau: sungguh memalukan sekali” baginya kini Indonesia kembali kepada derajat sebelum proklamasi, yaitu “derajat nul besar.”<sup>41</sup>

Pada tanggal 4 Agustus 1949 disusun delegasi Indonesia yang akan mengikuti perundingan-perundingan dengan Belanda di Den Haag selama Konferensi Meja Bundar. Kira-kira pada waktu yang bersamaan Moh. Natsir, yang dalam kabinet sebelumnya menjabat sebagai Menteri Penerangan, ditugaskan oleh Moh. Hatta untuk mengadakan hubungan dengan Kartosuwirjo, agar Kartosuwirjo menghentikan semua permusuhan terhadap angkatan bersenjata Republik. Dengan berangkatnya Hatta ke Den Haag pada tanggal 6 Agustus, ini bagi Kartosuwirjo merupakan pertanda untuk

---

<sup>40</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 86.

<sup>41</sup> *Salinan Pedhoman Dharma Bhakti II*, lihat Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 91.

bertindak, karena dengan keberangkatan Hatta ke Den Haag baginya kini terdapat “fakum Kekuasaan”.

Dengan penuh perjuangan akhirnya Kartosuwirjo memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949, di kampung Cisampang, desa Cidugaleuin, kecamatan Leuwisari Tasikmalaya, yang dihadiri oleh anggota Komandemen Tertinggi, yaitu Dewan Imamah yang dulu. Dalam surat jawaban Kartosuwirjo kepada Natsir yang terdiri dari beberapa baris, Kartosuwirjo menerangkan, bahwa sayang sekali tiga hari sebelumnya dia telah memproklamasikan Negara Islam Indonesia, dan kini proklamasi itu tidak dapat ditarik kembali. Dan menyatakan kata-kata itu dalam gayanya yang khas: “Saya tidak mau menelan air ludah saya kembali”.<sup>42</sup>

Menurut suatu pendapat yang tersebar luas di Indonesia, terdapat kerjasama antara APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang dibentuk oleh Westerling bekas komandan kesatuan istimewa Belanda dengan gerakan Darul Islam-Kartosuwirjo, bahkan diduga keras bahwa kedua orang tersebut pernah bertemu di hotel Preanger di Bandung. Menurut angapan itu terdapat semacam perjanjian antara APRA dan gerakan Darul Islam, bahwa pada waktu APRA menyerang Bandung, gerakan DI akan menyerang kota itu juga apabila gerakan itu berhasil, kota Bandung akan dijadikan basis dan ibu-kota gerakan Darul Islam. Tetapi kebenaran berita itu tidak pernah dapat dibuktikan. Kartosuwirjo sendiri selalu membantah, bahwa dia pernah

---

<sup>42</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 94.

bertemu dengan Westerling atau orang Belanda lainnya. Ini telah dinyatakan dalam satu Maklumat NII pada waktu disidangkannya perkara Jungschlager pada tahun 1957.<sup>43</sup>

Perjuangan Kartosuwirjo untuk mendirikan Negara Islam Indonesia sangatlah panjang dan berat. Meskipun perjuangan tersebut disebut sebagai sebuah “pemberontakan”, tetapi itu merupakan pemberontakan yang tidak biasa, ia merupakan sebuah perjuangan suci untuk memerangi kedzaliman. Pemberontakan ini bukanlah pemberontakan kecil, bukan pemberontakan yang bersifat regional, bukan pula pemberontakan yang muncul karena sakit hati atau kekecewaan politik lainnya. Melainkan pemberontakan karena cita-cita yang diilhami oleh ajaran Islam yang lurus.

Lahirnya Negara Islam Indonesia sesungguhnya bukanlah hasil rekayasa manusia dalam hal ini adalah Kartosuwirjo, melainkan *af'alullah* yaitu perbuatan serta program langsung dari Allah SWT. Pada saat proklamasi Negara Islam Indonesia diikrarkan, sesungguhnya sejak saat itu umat Islam di seluruh Indonesia khususnya, telah memperoleh kemerdekaan secara hakiki. Mereka telah memilih negara dan juga pemerintahan yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar negara. Jika setiap Muslimin di negara ini tidak bebas untuk melaksanakan syariat Islam dan tidak pula diperintah oleh aturan serta undang-undang Islam, maka pada hakikatnya mereka belum merdeka. Maka menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk

---

<sup>43</sup> Ibid., 125.

memperjuangkan kemerdekaan yang bebas dari segala bentuk belenggu jahiliyah demi kemanusiaan, keadilan, serta kebebasan melaksanakan syari'at Islam.

Yang paling dibutuhkan untuk dakwah Islam di Zaman sekarang ini adalah, mendirikan *Dar Islam* atau Negara Islam yang mengadopsi risalah Islam baik akidah dan undang-undang, ibadah dan akhlak, cara hidup dan kebudayaan. Yang bisa menjalankan baik secara materi dan adab dengan berdasar pada risalah yang lengkap.<sup>44</sup>

### C. Akhir Perjuangan Kartosuwirjo

Pengakuan kedaulatan republik Indonesia dari Belanda membuat keadaan lebih mendesak bagi Soekarno, bagaimana caranya untuk mencari penyelesaian masalah tentang Negara Islam Indonesia yang telah diproklamasikan oleh Kartosuwirjo. Maka pada bulan Desember 1949 diadakan sebuah usaha untuk membujuk atau menyadarkan Kartosuwirjo supaya dia kembali ke dalam pangkuan Republik. Usaha pertama yang dilakukan oleh pemerintah RIS yaitu dengan menugaskan Menteri Agama K. H. Masykur yang akan berangkat ke Yogyakarta untuk mengadakan pembicaraan dengan Kartosuwirjo, namun rencana tersebut gagal karena ia tidak bertemu dengan Kartosuwirjo.

Ketika Mohammad Natsir menjabat sebagai Perdana Menteri, dia memasukkan persoalan DI/TII dalam program kabinetnya. Awal mula yang

---

<sup>44</sup> H. Moh. Toriquddin, *Relasi Agama dan Negara (Dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer)*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 43.

dijalankannya adalah memecahkan masalah DI/TII dengan jalan damai dengan mengutus beberapa tokoh yang dekat dengan Kartosuwirjo. Pada tanggal 14 Mei 1950, Natsir mengutus Wali Alfatah untuk berangkat ke Priangan menemui Kartosuwirjo. Namun pertemuan itu gagal karena pasukan APRIS di bawah perintah kolonel Nasuhi yang sebelumnya telah membuat perencanaan pertemuan tersebut mengepung sebuah kesatuan TII untuk menjamin keamanan pertemuan tersebut.

Semakin pihak RI mengadakan penumpasan terhadap perjuangan Darul Islam, disitu pula kiranya Allah memberikan pertolongan-Nya terhadap perjuangan suci Kartosuwirjo ini. Dengan “*Kurnia Allah*” pada tanggal 20 Januari 1952, Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh Kartosuwirjo disambut oleh Kahar Muzakkar yang siap menggabungkan diri dalam NII. Dan siap pula menerima tawaran Kartosuwirjo untuk memegang pimpinan Tentara Islam Indonesia. Menyusul digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id kemudian pada tanggal 21 September 1953, Abu Daud Beureueh menyatakan bahwa daerah Aceh menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia dan memutuskan semua hubungan dengan pemerintah pusat di Jakarta. Dan didukung pula oleh Ibnu Hajar dari Kalimantan Barat.<sup>45</sup> Maka dengan demikian bertambah kuatlah kedudukan Negara Islam Indonesia dengan masuknya tokoh besar itu.

Ketika pimpinan Angkatan Bersenjata pada tahun 1958 sedang sibuk dengan penumpasan pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi, timbul rencana untuk merevisi doktrin militer yang selama itu dipraktekkan. Hasilnya adalah konsep perang

---

<sup>45</sup> Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah* 2, 188.



wilayah dengan dasar pemikiran, bahwa tanpa adanya bantuan aktif dari rakyat, pemberontakan tidak akan dapat ditumpas. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan doktrin perang wilayah adalah Pangdam Siliwangi, Ibrahim Aji, yang pernah menjabat sebagai atase militer di Beograd.

Penumpasan dan pengisolasian gerakan Darul Islam dimulai pada pertengahan tahun 1960 di kabupaten Lebak yang termasuk korem Banten, untuk menutup kemungkinan adanya anggota DI yang dapat menyeberang ke Sumatera. Di daerah Banten ini juga untuk pertama kali penduduk setempat diikuti sertakan dalam operasi militer yang mula-mula dinamakan sebagai “Perang Bedok” dan kemudian terkenal sebagai sistem “Pagar Betis”. Tetapi pada mulanya sistem ini kurang berhasil, dan baru setelah keamanan untuk semua partisipan diperbaiki, sistem Pagar Betis merupakan salah satu syarat untuk berhasil dalam peningkatan dan pengisolasian pemberontak, terutama di daerah Banten dan Priangan.<sup>46</sup>

Setelah melalui pertarungan panjang, melelahkan, dan memakan banyak korban, gerakan Darul Islam berhasil dilumpuhkan pemerintah RI. Sebagian anggota Darul Islam menyerah, dan Kartosuwirjo juga berhasil ditangkap pada 4 Juni di sebuah lembah antara Gunung Sangkar dan Gunung Geber. Pada saat ditangkap Kartosuwirjo dalam keadaan sakit parah terbaring di lantai gubuk persembunyiannya. Ketika ditangkap Kartosuwirjo meminta agar dokumen-dokumen tentang Negara Islam Indonesia tidak dihancurkan, dan permintaan itu di kabulkan oleh Suhanda

---

<sup>46</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 187.

sebagai komandan pasukan Republik. Kemudian Kartosuwirjo dibawa ke Majalengka bersama dengan puteranya Darda dan Aceng Kurnia. Kemudian mereka dibawa ke markas Ibrahim Aji dan seterusnya ke Garut. Dan pada tanggal 7 Agustus Kartosuwirjo dibawa dari Bandung ke Jakarta.<sup>47</sup>

Setelah ditangkap Kartosuwirjo dipaksa untuk mencabut proklamasi Negara Islam Indonesia, membatalkan jihad, dan menyatakan menyerah. Ketiga hal ini ditolak oleh Kartosuwirjo. Pemerintah RI kemudian memerintah anak Kartosuwirjo untuk menyusun sebuah perintah harian yang diatasnamakan ayahnya, yang berbunyi sebagai berikut:

“ Kepada seluruh anggota APNII dan *Jama'atul Mujahidin* di mana pun mereka berada untuk menghentikan tembak menembak dan permusuhan antara APNII dan TNI/APRI dan melaporkan diri kepada pos-pos TNI yang terdekat dengan membawa segala alat perang dan dokumen-dokumen. Segala pertanggung jawab dlahir-bathin dan dunia akhirat yang boelh tumbuh daripada perintah harian ini menjadi pikulan kami selaku Imam-Panglima Tertinggi Angkatan Perang NII sepenuhnya”.<sup>48</sup>

Setelah kesehatan Kartosuwirjo pulih kembali, mulailah diadakan penyelidikan-penyelidikan dan pemeriksaan untuk dapat mengadili perkara tersangka S. M. Kartosuwirjo. Dia juga diperiksa oleh seorang psikolog dan seorang ahli penafsir tulisan tangan (grafolog). Menurut MAHADPER dalam sidang ketiga pada tanggal 16 Agustus 1962 telah terbukti, bahwa segala daya usaha yang telah

---

<sup>47</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 206.

<sup>48</sup> Adhe Firmansyah, *S. M. Kartosuwirjo*, 92.

dilakukan selama kurang lebih 13 tahun oleh Kartosuwirjo dengan mendirikan dan memperjuangkan Negara Islam Indonesia itu adalah rencana makar yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan RI yang sah, dan pengadilan menyatakan, bahwa perjuangan Kartosuwirjo dalam menegakkan Negara Islam Indonesia itu adalah sebuah pemberontakan. Disamping itu, bahwa dia telah memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengadakan aksi pembunuhan terhadap diri presiden Soekarno. oleh karena itu, ketua sidang mengumunkan keputusan Mahkamah, yaitu hukuman mati atas terdakwa Kartosuwirjo.<sup>49</sup>

Kartosuwirjo mengakui memproklamasikan Negara Islam Indonesia dan melawan TNI dan kekuasaan sah di dalam wilayah Indonesia dengan senjata. Tetapi dia tidak mengakui jika ia memerintah pasukannya untuk membunuh Soekarno.<sup>50</sup> Menurut Kartosuwirjo, perintah pembunuhan itu diibaratkannya "dongeng dan isapan jempol berbahaya" yang sengaja direkayasa untuk memastikan dirinya dijatuhkan hukuman mati. Kartosuwirjo memberikan analogi tentang "isapan jempol berbahaya" yang benar-benar pernah terjadi dalam sejarah. Hitler, kata Kartosuwirjo, telah memanfaatkan kebakaran gedung Reichstag di Berlin untuk membunuh kaum Yahudi di Jerman. Belanda juga pernah mengasingkan ratusan pejuang ke Boven Digul (Irian Barat) karena dituduh terlibat pemberontakan komunis (1926-1927) padahal mereka tidak ada sangkut pautnya dengan pemberontakan tersebut.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid., 208.

<sup>50</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 203.

<sup>51</sup> Adhe Firmansyah, *S. M. Kartosuwirjo*, 92.

Selanjutnya Kartosuwirjo menyusun surat wasiat yang terdiri dari empat bagian. Dalam bagian pertama, Kartosuwirjo menerangkan kepada anggota keluarganya untuk tetap bersabar dalam menerima *Qadar* Allah yang pahit itu. Kepada istrinya, Siti Dewi Kalsum, dia berpesan untuk selalu terus menerus membimbing anaknya menjadi putera-puteri Islam yang sejati. Dalam bagian kedua, Kartosuwirjo mengucapkan selamat berpisah kepada eks-*Mujahidin* dan bawahannya. Mereka perlu mengetahui, demikian Kartosuwirjo, bahwa dia hingga saat-saat terakhir bertindak dan berbuat selaku Imam Panglima Tertinggi APNII. Dan dia tidak ragu-ragu, bahwa apa yang dia lakukan bersumberkan perintah-perintah Allah dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan siap menjadi saksi kelak di akhirat. Dalam wasiat itu juga dituliskan, bahwa dia *haqqul yakin* suatu waktu cita-cita Islam yang telah diperjuangkannya akan terlaksana di bumi Indonesia. Walaupun lawannya tetap menantang kedua bagian terakhir wasiatnya, Kartosuwirjo mohon kepada instansi yang berwenang supaya barang-barang milik pribadi diberikan kepada keluarganya. Wasiat terakhirnya yaitu, jika nanti dia mati, supaya dia dikuburkan di tanah miliknya sendiri, yaitu di *suffah* yang terletak di desa Cisu, kecamatan Malangbong. Kepada pemerintahan RI dia mengajukan permintaan, supaya wasiat-wasiatnya disiarkan lewat pers dan radio. Dari wasiat tersebut tidak ada satupun yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran*, 208.

Sebelum dieksekusi sekitar awal September, Kartosuwirjo dipertemukan dengan keluarganya. Dalam pertemuan tersebut menurut Tahmid (putera Kartosuwirjo), Kartosuwirjo mengatakan, bahwa kematian adalah keniscayaan, dan dengan cara apapun. Lalu, ia berpesan kepada anak-anak agar menjaga ibunya. Kedua, agar mereka menjadi mukmin dan mujahid yang baik. Ketiga, agar seluruh keluarga tidak jauh-jauh dari Siliwangi. “tidak ada pesan-pesan perjuangan DI/TII” ucapnya.<sup>53</sup>

Pada saat itu, keluarga Kartosuwirjo meminta beberapa hal. Yakni, agar eksekusi mati disaksikan keluarga atau wakil keluarga, kemudian, mayat Kartosuwirjo supaya diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di Malangbong. Atau bila tidak, keluarga diberitahu di mana jasad Kartosuwirjo dikuburkan supaya bisa berziarah. Tetapi semuanya ditolak oleh MAHADPER. Meski kecewa, tapi keluarga Kartosuwirjo pasrah. Sekitar pukul 14.00 WIB, pertemuan diakhiri. Keluarga kembali ke Bandung via Karawang. Sejak saat itu, mereka tidak tahu lagi apa yang terjadi.<sup>54</sup>

Kodam Jaya telah memerintahkan untuk melaksanakan keputusan MAHADPER dan menyusun regu tembak yang terdiri dari empat angkatan. Kemudian pada tanggal 4 September di pagi buta, Kartosuwirjo bersama-sama dengan regu penembak dibawa dengan sebuah kapal pendarat kepunyaan Angkatan

---

<sup>53</sup> Irwan Nugroho, dkk, "Fakta Baru Eksekusi Kartosuwirjo", Majalah Detik, (17-23 September 2012), 11.

<sup>54</sup> Ibid., 11

Laut dari pelabuhan Tanjung Priok ke sebuah pulau di teluk Jakarta, di mana hukuman mati dilaksanakan. Pada pukul 5.50, tepat setelah komandan regu tembak memberikan tembakan pengampunan, oleh dokter dikeluarkan Visum et Repertum untuk Kartosuwirjo dan juga di pantai pulau itu jenazah Kartosuwirjo dikebumikan menurut adat Islam.<sup>55</sup>

Hukuman mati terhadap Kartosuwirjo menjadi akhir dari gerakan dan perjuangan Darul Islam di Jawa Barat. Akan tetapi gerakan Darul Islam di daerah lain tidak otomatis padam. Dalam catatan sejarah, komando pusat dan pimpinan pusat Darul Islam diserahkan dan diteruskan oleh Teungku Daud Beureueh yang selama itu memimpin gerakan Darul Islam di Aceh.

Dari perjuangan Kartosuwirjo tersebut, dapat dipahami bahwa Kartosuwirjo ingin membentuk negara yang ideal. Negara ideal adalah negara yang sesuai dengan cita-cita ajaran Islam. Secara empiris, negara ideal ini mengacu kepada Negara Madinah, baik pada masa Nabi maupun pada masa al-Khulafa' al-Rasyidin, karena di negara Madinah ini ajaran-ajaran Islam dilaksanakan dengan sempurna, terutama dengan menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif. Hanya saja karena karena kondisi pada masa kini sudah jauh berbeda dengan kondisi pada masa itu, maka format dan sistem kenegaraan yang ideal pada masa kini juga mengacu kepada

---

<sup>55</sup> Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 207.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

penghargaan nilai-nilai kemanusiaan universal serta kecenderungan dunia modern yang rasional.<sup>56</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>56</sup> Zainul Kamal, dkk, *Islam Negara&Civil Society (Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer)*, (Jakarta: Paramadina, 2005), 73.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, yakni pada bab pertama hingga bab terakhir, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pendiri Negara Islam Indonesia adalah Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo.

Kartosuwirjo, dilahirkan pada tanggal 7 Januari 1905 di Cepu, sebuah kota kecil antara Blora dan Bojonegoro. Ia adalah anak seorang mantri di kantor yang mengoordinasikan para penjual candu di kota kecil Pamotan, dekat Rembang. Pada usia 6 tahun, Kartosuwirjo masuk Sekolah Bumi Putra Kelas Dua. Setelah tamat ia melanjutkan pada Sekolah Dasar Kelas Satu yang memakai bahasa Belanda. Setelah ayahnya pindah ke Bojonegoro, ia berhasil masuk Sekolah Dasar Eropa (ELS). Setelah tamat dari ELS, ia melanjutkan studi ke Surabaya dan masuk Nederlandsch Indische Artsen School (NIAS), Sekolah Dokter Hindia Belanda. Tetapi ia dikeluarkan karena alasan politik. Pada masa sekolah, ia terdaftar sebagai anggota Jong Java. Kemudian ia keluar dari organisasi ini lalu masuk ke Jong Islamieten Bond (JIB). Dari gerakan Jong Java itulah, Kartosuwirjo memulai karirnya.

Pada tahun 1931, ia terpilih menjadi sekretaris PSII, dan pada tahun 1936 ia terpilih menjadi wakil ketua PSII. Pada tahun 1939 Kartosuwirjo



dikeluarkan dari PSII kemudian ia mendirikan Komite Pertahanan Kebenaran PSII (KPK-PSII). Pada tanggal 24 Maret 1940 dibentuklah PSII tandingan, dan pada tahun yang sama Kartosuwirjo mendirikan *Institut Suffah* yang bertempat di Malangbong. Pada tahun 1943 Kartosuwirjo masuk sebuah organisasi kesejahteraan dari MIAI (*Madjlis Islam 'Alaa Indonesia*) di bawah pimpinan Wondoamiseno, sekaligus menjadi sekretaris dalam Majelis *Baitulmal* pada organisasi tersebut.

2. Kartosuwirjo mendirikan Negara Islam Indonesia hanya semata-mata *itba'* kepada negara Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah yang dasar hukumnya mengacu kepada al-Qur'an dan Hadis Nabi, dan apabila melihat syarat-syarat untuk menjadi imam yang telah di sebutkan oleh al Mawardi, maka Kartosuwirjo telah memenuhi persyaratan tersebut, dan ia dapat diangkat menjadi imam.

3. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Indonesia, Belanda ingin menduduki Indonesia kembali, dengan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak Indonesia, Kartosuwirjo menolak perjanjian-perjanjian tersebut karena menurutnya perjanjian-perjanjian tersebut akan merugikan Indonesia. Ketika ditandatangani perjanjian Renville, maka pasukan Siliwangi harus keluar dari Jawa Barat dan pindah ke Yogyakarta. Tetapi Kartosuwirjo tidak menghiraukannya, ia serta pasukannya tetap tinggal di Jawa Barat untuk memerangi pasukan Belanda. Karena tentara Indonesia meninggalkan Jawa

Barat dan diserahkan kepada Belanda, maka Jawa Barat menjadi hak *De facto* bagi Negara Islam Indonesia.

Menurut Kartosuwirjo di Jawa Barat sejak didirikannya Negara Islam tahun 1948 hanya terdapat dua golongan yang saling mengadu kekuatan, yaitu Belanda dan Negara Islam Indonesia, semua golongan-golongan lainnya tidak diizinkan untuk menduduki sebuah daerah di Jawa Barat. Bila kesatuan-kesatuan tersebut memberikan perlawanan pada waktu mereka dilucuti, maka mereka dianggap sebagai musuh Negara Islam Indonesia dan musuh Islam. Termasuk juga Divisi Siliwangi yang ia anggap telah menyerahkan Jawa Barat kepada Belanda. Oleh karena itu kesatuan ini tidak lagi punya hak untuk menduduki kembali daerah Jawa Barat.

Dengan penuh perjuangan akhirnya Kartosuwirjo memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949, di kampung Cisampang, desa Cidugaleuin, kecamatan Leuwisari Tasikmalaya, yang dihadiri oleh anggota Komandemen Tertinggi, yaitu Dewan Imamah yang dulu. Sejak itulah hubungan TII dan RI berpatah arang, tidak mungkin lagi dapat diperbaiki.

Pada waktu Mohammad Natsir menjadi perdana menteri, ia beberapa kali mengupayakan agar Kartosuwirjo dan DI/TII-nya kembali ke pangkuan RI. Sejak 1960, pengikut Kartosuwirjo mulai berkurang. Dalam konflik

bersenjata dengan tentara RI, pasukan TII mulai terdesak. Pada 4 juni 1962, Kartosuwirjo tertangkap di sebuah gubuk di Gunung Geber, Majalaya, Bandung, Jawa Barat. Pada 16 Agustus 1962 Kartosuwirjo dijatuhi hukuman mati oleh MAHADPER. Dan hukuman mati itu dilaksanakan di bulan September 1962.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai peran Kartosuwirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah tidak sepenuhnya menganggap Kartosuwirjo sebagai pemberontak, Kartosuwirjo menurut penulis termasuk pahlawan Indonesia, karena Kartosuwirjo telah ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dengan mempertahankan Jawa Barat agar tidak dikuasai oleh Belanda. Dan pemerintah seharusnya memberi tahu letak makam Kartosuwirjo kepada keluarganya, karena menurut penulis itu merupakan hak dari keluarga Kartosuwirjo untuk mengetahui letak makam Kartosuwirjo.

2. Hasil dari penelitian ini tentunya masih belum sempurna. Penulis masih menggunakan sumber sekunder dalam penelitian ini karena kendala jarak dengan lokasi sumber primer. Untuk itu penulis menyarankan agar dalam penelitian selanjutnya mengenai Peran Kartosuwirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia dapat dilakukan secara lebih mendalam dengan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sumber-sumber primer yang lebih otentik. Jika dari hasil penelitian ini masih banyak kekurangan baik dalam segi penulisan ataupun tentang informasi yang berkaitan dengan peran Kartosuwirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia, maka penulis mengharapkan saran dari pembaca agar penulis dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah peneliti tuliskan dalam karya ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta; Arus Media, 2007.
- Afadlal,dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2005
- Ahmed, Akbar S. *Rekonstruksi Sejarah Islam (Di Tengah Pluralitas Agama dan Peradaban)*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Piagam Nabi Muhammad SAW: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Al- Chaidar. *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo (Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/DI-TII semasa Orde Lama dan Orde Baru)*. Jakarta: Darul Falah, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Wacana Ideologi Negara Islam (Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front)*. Jakarta: Darul Falah, 1998.
- Al-Mawardi, Imam. *Al Ahkam Al Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Terj. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Amiruddin, M. Hasbi. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Harahap, Syahrir. "Darul Islam". *Ensiklopedi Islam Volume 2* editor Nina M. Armando. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005

Aziz, Abdul. *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Madinah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011.

Benda, H. J. *Bulan Sabit dan Matahari terbit: Islam Indonesia pada masa Pendudukan Jepang*. Terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.

Boland, B. J. *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972*. Jakarta: PT Grafiti Pers, 1985.

Dengel, Holk H. *Darul Islam dan Kartosuwirjo (Angan-Angan yang Gagal)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Dijk, C. Van. *Darul Islam (Sebuah Pemberontakan)*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.

Djaelani, Abdul Qadir. *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.

Engineer, Asghar Ali. *Devolusi Negara Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Firmansyah, Adhe. *S.M. Kartosuwirjo (Biografi Singkat 1907-1962)*. Yogyakarta: GARASI, 2009.

Fuad, Zakki, *Negara Islam atau Negara Nasional (Pemikiran Fundamentalists vs Liberal)*. Kediri: Jenggala Pustaka Utama, 2007.

Haj, Abu Abdul Fattah Ali Ben Haj & Muhammad Iqbal. *Negara Ideal Menurut Islam (Kajian Teori Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Modern)*. Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia, 2001.

Hasjmy, A. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Kandu, Amirullah. *Ensiklopedi Dunia Islam (Dari Masa Nabi Adam a.s Sampai Dengan Abad Modern)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

Maryam, Siti. *Sejarah Peradaban Islam (Dari Masa Klasik Hingga Modern)*. Yogyakarta: LESFI, 2002.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu (Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Misrawi, Zuhairi. *MADINAH: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.

Mufrodi, Ali. *Pranata Sosial Islam Di Indonesia 1900-1945 (Politik dan Pendidikan)*. Surabaya: Alpha, 2007.

Muljana, Slamet. *Kesadaran Nasional (Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid 1)*. Yogyakarta: LkIS, 2008.

Mohammad, Herry. *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Nugroho, E. "Darul Islam". *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1988.

Poesponegoro, Marwati Djoened, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia VI (Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia 1942-1998)*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008.

Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

\_\_\_\_\_. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raia Grafindo Persada, 1997.

Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Jack, 2010.

Santoso, Kholid O. *Jejak-Jejak Sang Petualang Pemberontak (Pemikiran, Gerakan dan Ekspresi Politik S.M Kartosuwirjo dan Daud Beureueh)*. Bandung: Segaorsy, 2006

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*. Jakarta: UI Press, 1990.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sukarja, Ahmad, *Piagam Maadinah dan Undang-Undang Dasar 1945 (Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk)*. Jakarta: UI Press, 1995.

Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Toriquddin, H. Moh. *Relasi Agama dan Negara (Dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer)*. Malang: UIN Malang Press, 2009.

#### **Internet:**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Teori\\_peran](http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran) (diakses 21 juni 2013).



**Majalah:**

Nugroho, Irwan, dkk. "Fakta Baru Eksekusi Kartosuwirjo", Majalah Detik,  
(17-23 September 2012).